PEMERINTAH KABUPATEN BUTON









LKJIP

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Buton, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buton Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025. LKjIP Kabupaten Buton Tahun 2025 disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 yang digunakan selama masa transisi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Buton terpilih periode 2025-2029 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Buton yaitu **“"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”.**

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buton Tahun 2025 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 serta sekaligus sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungang.

Pasarwajo, 25 Maret 2026

BUPATI BUTON,

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA, SH

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Buton.

Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 yang digunakan selama masa transisi, dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Buton terpilih periode 2025-2029 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton pada tahun 2025. yang didasarkan atas Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

- Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang termuat dalam RPD 2023-2026 terhadap 27 indikator kinerja utama Bupati tahun 2025, disimpulkan bahwa terdapat 18 (Delapan Belas) capaian indikator sasaran atau sebanyak 66,66% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, 2 (Dua) Indikator sasaran atau sebesar

7,40% masuk dalam kategori tinggi, 2 (dua) Indikator sasaran atau sebesar 7,40% masuk dalam kategori sedang, namun ada 2 (dua) indikator sasaran atau 7,40% yang masuk dalam kategori rendah, bahkan ada 3 (tiga) indikator sasaran atau 11,11% masuk kriteria sangat rendah .

IKU yang masuk kriteria Sangat Tinggi, yaitu indikator yang pencapaiannya ≥91% meliputi: Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor ,Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks kualitas udara, Indeks kualitas tutupan tanah, Angka harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah, Angka harapan hidup, Pendapatan perkapita, Pengeluaran perkapita, Indeks pembangunan gender, Nilai SAKIP, Opini BPK, Indeks kepuasan masyarakat, Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan, Persentase penyelesaian tindak kejahatan, Indeks infrastruktur wilayah, dan Rasio elektrifikasi.

IKU yang masuk kriteria Tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya berada pada skala 76 < 90 meliputi : Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang) dan Gini Ratio.

IKU yang masuk kriteria sedang yaitu indikator yang pencapaiannya berada pada skala 66 < 75 yaitu Kategori kabupaten layak anak dan Persentase ormas aktif perikanan. Sementara yang pencapaiannya berada pada skala 51<65 dan masuk pada kriteria rendah adalah Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan Tingkat pengangguran terbuka dan 3 (tiga) Indikator yang masuk pada kriteria sangat rendah dengan capaian <50 meliputi Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian, Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan, dan Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional. Dengan demikian masih terdapat indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

- Sementara untuk hasil pengukuran kinerja yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terhadap 20 indikator kinerja utama Bupati tahun 2025, disimpulkan bahwa terdapat 12 (Dua Belas) capaian indikator sasaran atau sebanyak 60% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, 3 (tiga) Indikator sasaran atau sebesar 15% masuk dalam kategori tinggi, 2 (dua) Indikator sasaran atau sebesar 10% masuk dalam kategori rendah, namun ada 1 (satu) indikator sasaran atau 5% yang masuk dalam kategori sangat rendah, bahkan ada 2 (dua) indikator sasaran atau 10% yang datanya belum tersedia.

  IKU yang masuk kriteria Sangat Tinggi, yaitu indikator yang pencapaiannya ≥91% meliputi: Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), Nilai SAKIP Kabupaten Buton, Indeks Kesehatan, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Tingkat Kemiskinan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman, Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian, Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan

  IKU yang masuk kriteria Tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya berada pada skala 76 < 90 meliputi : Indeks Ketimpangan Gender, Rasio Gini, Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi

  IKU yang pencapaiannya berada pada skala 51<65 dan masuk pada kriteria rendah adalah Indeks Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka serta 1 (satu) Indikator yang masuk pada kriteria sangat rendah dengan capaian <50 yaitu Crime Rate, sementara terdapat 2(du) IKU yang data capaiannya untuk tahun 2025 belum tersedia yakni Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Ekonomi Biru. Dengan demikian masih terdapat indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Buton ke depan. Walaupun sebagian besar IKU telah mencapai target

yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan berbagai unsur baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara, dan daerah-daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah.

Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Buton untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GRAFIK x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 1
C. Dasar Hukum 2
D. Gambaran Umum 3
1. Kondisi Geografis 3
2. Kondisi Topografi 4
3. Kondisi Demografi 5
4. Kondisi Perekonomian Daerah 6
5. Kesejahteraan Masyarakat 9
E. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 10
F. Sumber Daya Manusia Aparatur 13
G. Isu Strategis 14
H. Sistematika Penyajian LKjIP 20
BAB II 21
PERENCANAAN KINERJA 21
A. Perencanaan Strategis 21
1. Visi 21
2. Misi 23
3. Tujuan dan Sasaran 25
4. Strategi dan Arah Kebijakan 47
B. Perjanjian Kinerja 62
BAB III 68
AKUNTABILITAS KINERJA 68
BAB IV 185
PENUTUP 185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kab.Buton 4
Gambar 1. 2 Komposisi ASN Pemkab.Buton Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin 13
Gambar 2. 1 Keterkaitan Antara Misi RPJMD Kabupaten Buton dengan Misi RPJMN dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten Buton dan Pemerintahan Menurut Kecamatan Tahun 2025....4
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton PerKecamatan Tahun 2025....5
Tabel 1. 3 PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Buton Tahun 2023-2025....8
Tabel 1. 4 Jumlah Desa/Kelurahan Pada Masing-masing Kecamatan Tahun 2025....12
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Buton 2023-2026....29
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten ButonTahun 2025-2030....36
Tabel 2. 3 Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton....40
Tabel 2. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Buton pada Perubahan RKPD Tahun 2025....44
Tabel 2. 5 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029....48
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025....63
Tabel 2. 7 Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025....65
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Dibandingkan Target perjanjian Kinerja Tahun 2025....70
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2024....74
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir Dalam Rencana Pembangunan Daerah....79
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Dibandingkan Target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025....84
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD....89
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Petumbuhan Potensi Ekonomi Lokal....95
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja SasaranTerkelolanya SDA Berwawasaan Lingkungan....99
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan....104
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah....109
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, pemuda dan olahraga....117
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah....124
Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa....131
Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya dan Kearifan Lokal....133
Tabel 3. 14 Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kehidupan Sosial Masyarakat....135
Tabel 3. 15 Data Tindak Pidana di Kabupaten Buton....137

Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata 139
Tabel 3. 17 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Energi Listrik 140
Tabel 3. 18 Jumlah Rumah Tangga Terfasilitasi Listrik 141
Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kerukunan Hidup dan Toleransi Antar Umat Beragama 144
Tabel 3. 20 Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan 146
Tabel 3. 21 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. 147
Tabel 3. 22 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton 148
Tabel 3. 23 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan 150
Tabel 3. 24 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan 151
Tabel 3. 25 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas keluarga 153
Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas keluarga yang Sejahtera dan sesuai norma kehidupan Masyarakat 154
Tabel 3. 27 Capaian Kinerja Sasaran Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat 155
Tabel 3. 28 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup 159
Tabel 3. 29 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketangguhan 161
Tabel 3. 30 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) Berkualitas 163
Tabel 3. 31 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah 164
Tabel 3. 32 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA 165
Tabel 3. 33 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 166
Tabel 3. 34 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA 169
Tabel 3. 35 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah 171
Tabel 3. 36 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas 172
Tabel 3. 37 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 175
Tabel 3. 38 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan berdasarkan Urusan dan Unsur 177
Tabel 3. 39 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Setiap Sasaran Kinerja 180

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 5
Grafik 1. 2 Komposisi Aparatur Pemkab.Buton Menurut Pendidikan Tahun 2025 14
Grafik 3. 1 Capaian IKU Bupati Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....94
Grafik 3. 2 Trend Pertumbuhan Ekonomi Di kabupaten Buton 2023-2025 95
Grafik 3. 3 Trend Pertumbuhan Ekonomi Di kabupaten Buton 2023-2025 101
Grafik 3. 4 Trend Indeks Kualitas Udara Kabupaten Buton.....102
Grafik 3. 5 Trend Indeks Kualitas Udara Kabupaten Buton.....106
Grafik 3. 6 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Lama Sekolah Kab. Buton terhadap Prov.Sultra Tahun 2023-2025.....107
Grafik 3. 7 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Lama Sekolah Kab. Buton terhadap Prov.Sultra Tahun 2023-2025.....108
Grafik 3. 8 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kab. Buton Terhadap Tingkat Kemiskinan Prov.Sultra Tahun 2023-2025.....110
Grafik 3. 9 Trend Pendapatan Perkapita di Kabupaten Buton Tahun 2023-2025 112
Grafik 3. 10 Perbandingan Pengeluaran Perkapita di Kab. Buton Terhadap Pengeluaran Perkapita Prov.Sultra Tahun 2023-2025.....113
Grafik 3. 11 Gini Ratio Nasional, Prov Sultra, Kabupaten Buton Tahun 2023-2025 114
Grafik 3. 12 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab.Buton.....116
Grafik 3. 13 Trend Tingkat Tingkat IPG Kab. Buton Terhadap IPG Prov Sultra Tahun 2022-2024.....121
Grafik 3. 14 Perbandingan Nilai Sakip Kab.Buton Terhadap Nilai Sakip Prov.Sultra 126
Grafik 3. 15 Trend Nilai SKM Kabupaten Buton Tahun 2023-2025 130
Grafik 3. 16 Trend Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Buton Tahun 2023-2025.....132
Grafik 3. 17 Capaian IKU Bupati Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2025-2030).....143
Grafik 3. 18 Perbandingan Nilai Sakip Kab.Buton Terhadap Nilai Sakip Prov.Sultra 149
Grafik 3. 19 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kab. Buton Terhadap Tingkat Kemiskinan Prov.Sultra Tahun 2023-2025.....156
Grafik 3. 20 Gini Ratio Nasional, Prov Sultra, Kabupaten Buton Tahun 2023-2025 158
Grafik 3. 21 Trend Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2025 162
Grafik 3. 22 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab.Buton Terhadap TPT Prov. Sultra Tahun 2023-2025.....174

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Buton disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Buton.

Adapun Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

a. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah;
b. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sementara Penyelenggaraan SAKIP itu sendiri meliputi, Rencana strategis, Perjanjian kinerja, Pengukuran kinerja, Pengelolaan data kinerja, Pelaporan kinerja, Reviu dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan maksud untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Sementara untuk tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Laporan Kinerja Pemerintah juga

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama tahun 2025, sebagai bahan pengambilan kebijakan, serta penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2025 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029
12. Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026.

D. Gambaran Umum

Gambaran umum daerah meliputi paparan tentang kondisi geografis, gambaran umum demografis dan kondisi ekonomi Kabupaten Buton. Secara rinci mengenai hal-hal tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 5,30 – 5,390 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122,80 – 123,130 Bujur Timur.

Kabupaten Buton di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton.

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ± 1.665,1467 km2, dimana pada tahun 2014 mengalami pemekaran menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan. Sehingga

kecamatan di Kabupaten Buton menjadi 7 kecamatan dengan luas wilayah masing-masing seperti tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten Buton dan Pemerintahan Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Desa	Kelurahan
1.	Lasalimu	315,45	14	1
2.	Lasalimu Selatan	147,34	16	0
3.	Siontapina	248,57	11	0
4.	Pasarwajo	330,22	13	9
5.	Wabula	63,54	7	0
6.	Wolowa	94,27	7	0
7.	Kapontori	465,27	15	2
	Jumlah	**1.665,14**	**83**	**12**

Sumber : BPS, Kabupaten Buton dalam Angka Tahun 2026

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kab.Buton



Sumber: RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

2. Kondisi Topografi

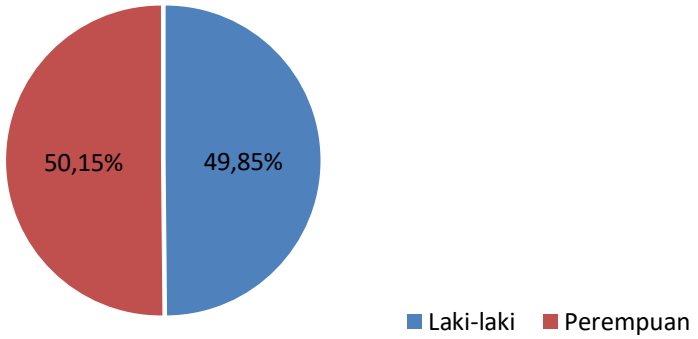
Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-

daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan relatif rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 40°.

3. Kondisi Demografi

Secara Demografi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Jumlah penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2025 sebanyak 122.423 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 61.028 jiwa (49,85%) dan Perempuan 61.395 jiwa (50,11%) dengan kecamatan Pasarwajo menjadi Kecamatan dengan Jumlah Penduduk terbesar dan Kecamatan Wolowa adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Komposisi dan jumlah penduduk tiap kecamatan dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini:

Grafik 1. 1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton PerKecamatan Tahun 2025

NO.	NAMA KECAMATAN	TAHUN 2025	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN
1	Lasalimu	13.363	0,09

2	Lasalimu Selatan	16.155	0,24
3	Siotapina	16.982	0,24
4	Pasarwajo	46.589	0,11
5	Wolowa	6.968	0,32
6	Wabula	6.842	3,27
7	Kapontori	15.499	0,05
	JUMLAH	122.423	0,16

Sumber : BPS, Buton Dalam Angka 2026

4. Kondisi Perekonomian Daerah

Meningkatnya nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukan makin berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Secara umum perekonomian masyarakat Kabupaten Buton bertumpu pada beberapa sektor. Gambaran mengenai kondisi ekonomi Kabupaten Buton yang meliputi potensi unggulan daerah dan pertumbuhan ekonomi dipaparkan sebagai berikut :

a) Potensi Sumber Daya Alam dan Daerah

Berdasarkan kondisi alamnya, maka Kabupaten Buton memiliki 2 (dua) jenis komoditas unggulan, yakni; ASPAL dan PERIKANAN LAUT. Keberadaan aspal Buton yang telah di eksplorasi dan di eksploitasi sejak zaman Belanda merupakan tempat kedua di dunia atas temuan adanya aspal alam setelah TRINIDAD. Sedangkan menurut kondisi Kabupaten Buton sebagai hamparan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut lepas dan pertemuan arus Utara-Selatan, mengakibatkan daerah ini sangat kaya dengan potensi perikanan laut.

b) Potensi Sumber Daya Pesisir Dan Laut

Kabupaten Buton mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut antara lain :

- Perikanan laut hasil tangkapan
- Perikanan budidaya

c) Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Tanaman Jambu Mete merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Buton dimana komoditas ini adalah salah satu komoditas khas Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara

d) Potensi Pariwisata dan Budaya

Selain dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia, Kabupaten Buton juga memilki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Beberapa obyek wisata yang menarik dikunjungi antara lain : Suaka Margasatwa Lambusango dan cagar alam Kakenauwe. Merupakan hutan hujan tropis yang belum tersentuh, dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung.

e) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, income per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak. Perekonomian Kabupaten Buton menunjukkan tren naik turun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,74 persen, menandakan pemulihan yang cukup kuat. Namun, pada tahun 2023 terjadi perlambatan dengan angka pertumbuhan turun menjadi 3,03 persen. Meski

demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,20 persen, hanya saja kembali terjadi Pelambatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan terjadi triwulan II 2025 sebesar 2,56%, tertinggal dari angka nasional yang mencapai 5,12%. Berikut perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton menurut lapangan usaha tahun 2023-2025.

Tabel 1. 3 PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Buton Tahun 2023-2025

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar Rupiah)		
	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.048,70	**1.147,35**	**1.234,15**
Pertambangan dan Penggalian	1.992,17	1.830,42	1.787,08
Industri Pengolahan	107,78	132,41	168,07
Pengadaan Listrik dan Gast	2,11	2,35	2,60
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,12	19,46	20,23
Konstruksi	268,41	325,26	325,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	746,31	819,85	948,50
Transportasi dan Pergudangan	41,82	47,17	49,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,03	6,51	8,44
Informasi dan Komunikasi	13,08	14,98	17,39

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar Rupiah)		
	2023	2024	2025
Jasa Keuangan dan Asuransi	36,74	35,76	40,41
Real Estatet	22,10	22,87	22,88
Jasa Perusahaan	0,91	0,98	1,11
Adm. Pemerintahan,Pertahanan JamSos Wajib	417,31	530,96	559,16
Jasa Pendidikan	269,56	287,70	315,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39,89	42,14	43,28
Jasa lainnya	30,62	31,08	32,11
PDRB	5.062,66	5.297,27	5.575,58

Sumber : BPS Kabupaten Buton (Buton Dalam Angka 2026)

5. Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran ini disebut sebagai Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk sandang, kesehatan, perumahan dan

pendidikan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu: 1. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan; 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; 3. Indeks Keparahan Kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

E. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Buton telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

Adapun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Tipe B
b. Sekretariat DPRD Tipe C
c. Inspektorat Daerah Tipe B
    1) Dinas Daerah Kabupaten Buton, terdiri dari: Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
    2) Dinas Pariwisata Tipe A
    3) Dinas Perikanan Tipe A

4) Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tipe A
5) Dinas Pendidikan Tipe B
6) Dinas Kesehatan Tipe B
7) Dinas Perhubungan Tipe B
8) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B
9) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B
10) Dinas Transmigrasi Tipe B
11) Dinas Pertanian Tipe B
12) Dinas Perindustrian Tipe B
13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B
14) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B
15) Dinas Sosial
16) Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB Tipe B
17) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B
18) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tipe B
19) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B
20) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
21) Dinas Penanaman Modal & PTSP Tipe B
22) Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah Tipe B
23) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B
24) Dinas Tenaga Kerja Tipe C
25) Dinas Perdagangan Tipe C
26) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C
27) Dinas Kebudayaan Tipe C

d. Badan Daerah, terdiri dari:

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B
2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe Badan Pendapatan Daerah Tipe B
3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C
4) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C

5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A
6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Kelas C

g. Kecamatan yang berjumlah 7 (tujuh).

Sejak Tahun 2014 Wilayah administratif Kabupaten Buton mempunyai 7 (tujuh) Kecamatan yang membawahi dari 83 Desa dan 12 Kelurahan, yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 4 Jumlah Desa/Kelurahan Pada Masing-masing Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Banyaknya		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Lasalimu	Kamaru	14	1	15
2.	Lasalimu Selatan	Ambuau	16	0	16
3.	Siontapina	Kumbewaha	11	0	11
4.	Pasarwajo	Pasarwajo	13	9	22
5.	Wabula	Wabula	7	0	7
6.	Wolowa	Waole	7	0	7
7.	Kapontori	Mataumpana	15	2	17
Jumlah			**83**	**12**	**95**

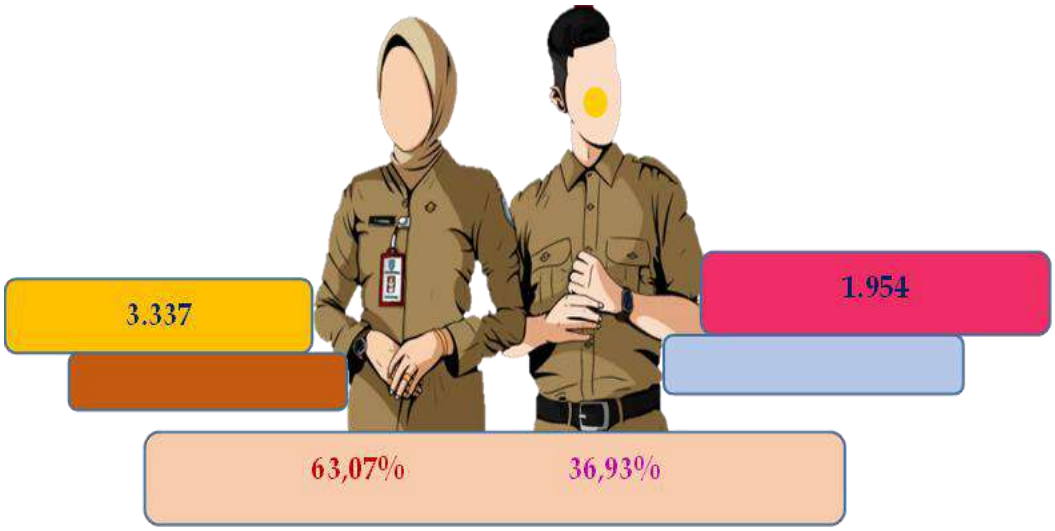
Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2026

Pada Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pasarwajo (13 desa dan 9 kelurahan), menyusul Kecamatan Kapontori (15 desa dan 2 kelurahan), Kecamatan Lasalimu (14 Desa dan 1 Kelurahan), sedangkan 4 (empat) Kecamatan lain hanya terdapat desa tanpa kelurahan, dan Kecamatan yang memiliki Desa terbanyak adalah Kecamatan Lasalimu Selatan (16 Desa), Kecamatan Siotapina (11 Desa) dan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Wabula dan Kecamatan Wolowa masing-masing mempunyai 7 Desa.

F. Sumber Daya Manusia Aparatur

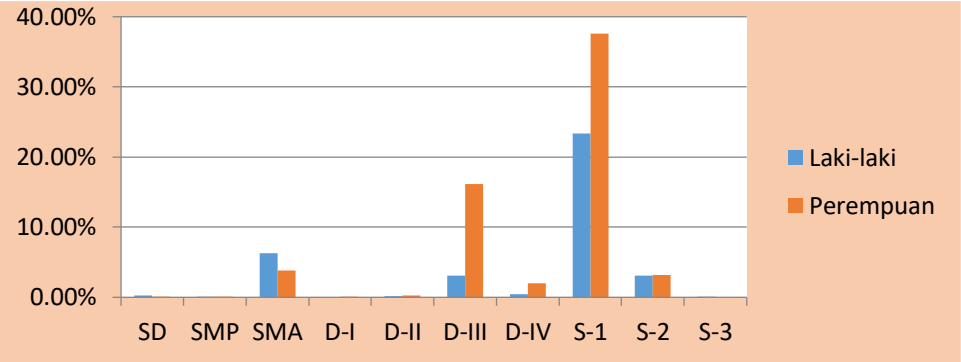
Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Aparatur Sipil Negara Pemkab.Buton pada tahun 2025 berjumlah 5.291 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.954 orang (36,93%) dan perempuan sebanyak 3.337 orang (63,07%).

Gambar 1. 2 Komposisi ASN Pemkab.Buton Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin



Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Pemkab.Buton (ASN) didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 61% atau 3.228 orang, disusul oleh jenjang pendidikan DIII sebanyak 18,04 % atau 955 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Pemkab.Buton cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. 2 Komposisi Aparatur Pemkab.Buton Menurut Pendidikan Tahun 2025



Sumber: (BKPSDM Kabupaten Buton per Desember 2025)

G. Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan empat tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Buton yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Hilirisasi Pengelolaan Komoditas Unggulan Buton

Hilirisasi pengelolaan komoditas unggulan Aspal Buton (Asbuton) di Kabupaten Buton merupakan langkah strategis dalam pembangunan jangka menengah daerah. Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam lokal melalui berbagai inisiatif pengolahan dan pemanfaatan aspal buton, pertanian dan perikanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, dengan adanya hilirisasi ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas infrastruktur yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan jangka menengah, Kabupaten Buton berfokus pada pengembangan infrastruktur pendukung industri pengolahan perikanan, pertanian dan Asbuton seperti pembangunan pabrik pengolahan dan fasilitas pendukung lainnya. Langkah ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investor swasta dan pemerintah pusat, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program hilirisasi ini. Dengan demikian, Kabupaten Buton tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga produsen produk akhir yang memiliki daya saing di pasar nasional dan internasional. Transformasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi regional dan menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

2) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Buton merupakan salah satu pilar utama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, adopsi teknologi hijau, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Dengan memprioritaskan keberlanjutan, Kabupaten Buton berusaha menciptakan ekonomi yang tahan terhadap perubahan global dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam pembangunan

jangka menengah, Kabupaten Buton juga menitikberatkan pada penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan industri berbasis komunitas dan peningkatan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Program program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan serta pengembangan pariwisata berbasis lingkungan turut menjadi fokus utama. Semua ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan agar setiap langkah pembangunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial jangka panjang. Dengan strategi ini, Kabupaten Buton diharapkan mampu mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

3) Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi fondasi utama dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Buton. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh. Langkah-langkah yang diambil meliputi peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), penerapan sistem manajemen kinerja yang transparan, serta pengembangan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel, diharapkan pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Selain itu, Kabupaten Buton juga fokus pada penerapan prinsip-prinsip good governance dalam setiap aspek pemerintahan. Pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang ketat menjadi prioritas untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik juga didorong untuk memastikan kebijakan yang

diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga. Dengan demikian, pemerintahan yang profesional dan akuntabel tidak hanya menjadi katalisator bagi pembangunan daerah, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Buton yang berkelanjutan.

4) Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul

Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat, dan unggul merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton. Pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Program beasiswa, pelatihan guru, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah menjadi fokus utama. Selain itu, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta penguatan pendidikan vokasional dan keterampilan juga diutamakan. Dengan langkah langkah ini, diharapkan generasi muda Kabupaten Buton dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk bersaing di tingkat nasional dan global. Di bidang kesehatan, Kabupaten Buton berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta program-program pencegahan dan penanganan penyakit menjadi prioritas utama. Selain itu, kampanye hidup sehat dan peningkatan gizi masyarakat juga dijalankan secara intensif untuk memastikan masyarakat Buton tidak hanya bebas dari penyakit tetapi juga memiliki kondisi fisik yang prima. Dengan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul, Kabupaten Buton berharap dapat menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing tinggi, yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan.

5) **Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat**

Percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda krusial dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton. Pemerintah daerah berfokus pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar. Salah satu inisiatif utama adalah peningkatan program bantuan langsung tunai dan subsidi bagi keluarga pra-sejahtera untuk memastikan kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Selain itu, pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM menjadi prioritas untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan strategi ini, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam upaya mengurangi ketimpangan kesejahteraan, Kabupaten Buton juga mengimplementasikan kebijakan redistribusi pembangunan yang berkeadilan. Investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih di daerah terpencil menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, mendapatkan manfaat dari pembangunan. Selain itu, program-program pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu diintensifkan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif ini, Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

6) **Meningkatnya Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup**

Dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Buton, terlihat peningkatan potensi degradasi kualitas lingkungan hidup yang menjadi perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang pesat seringkali berdampak negatif pada ekosistem lokal. Perambahan hutan untuk

pembangunan, peningkatan limbah industri, dan peningkatan aktivitas pertanian yang tidak berkelanjutan semakin memperburuk kondisi lingkungan hidup di wilayah tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya potensi degradasi. Kebutuhan akan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi semakin mendesak. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti pengelolaan limbah yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi, serta penerapan kebijakan yang memperhatikan aspek lingkungan secara lebih menyeluruh untuk mengatasi tantangan ini dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

7) **Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Buton**

Dalam konteks pembangunan jangka menengah di Kabupaten Buton, terjadi peningkatan yang signifikan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kabupaten Buton kaya akan warisan budaya yang meliputi tradisi, kesenian, dan adat istiadat yang unik dan bernilai tinggi secara historis. Dalam rangka mempromosikan kekayaan budaya ini, pemerintah setempat telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti mendukung pertunjukan seni tradisional atau event kebudayaan, penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah lintas sektor agar pembangunan kebudayaan dilakukan secara terpadu serta mengintegrasikan pendidikan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah. Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya Buton tidak hanya memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan mempromosikan pariwisata budaya. Melalui upaya ini, generasi muda diberi kesempatan untuk memahami, menghargai, dan mewarisi warisan budaya yang kaya, sehingga memastikan keberlangsungan budaya Buton untuk masa depan. Dengan terus mendorong inisiatif ini dalam pembangunan jangka menengah, Kabupaten Buton dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal mereka.

8) Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Penataan Wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton, percepatan pemerataan pembangunan dan penataan wilayah yang berkualitas serta ramah lingkungan menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah. Melalui kebijakan yang terarah, pemerintah setempat berupaya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di daerah perkotaan, tetapi juga merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton. Hal ini dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik yang mencakup daerah-daerah pedesaan yang sebelumnya terpinggirkan. Tak hanya itu, penataan wilayah yang ramah lingkungan juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Melalui penggunaan teknologi hijau, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan promosi penggunaan energy terbarukan, Kabupaten Buton berupaya membangun lingkungan yang berkelanjutan dan lestari. Dengan demikian, pembangunan jangka menengah di Kabupaten Buton bukan hanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

H. Sistematika Penyajian LKjIP

Laporan akuntabilitas tahunan Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2025 ini disusun dalam empat Bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menjadi tantangan tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Penetapan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton tahun 2025 sebagai penyempurnaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai penuntasan terhadap permasalahan dan isu - isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan periode Tahun 2025-2030. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Buton ditetapkan visi daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2030 yaitu:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"

Dalam rumusan Visi Terwujudnya Masyarakat Buton yang Religius, Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan dengan tagline BUTON BERSINAR, terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Buton di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang

hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Buton dijelaskan sebagai berikut :

1. **Religius**, Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan ajaran, nilai dan norma norma luhur dari masing-masing individu pemeluk agama dan kepercayaan untuk menciptakan suasana hubungan yang harmonis dengan sikap saling menghormati dan menghargai.
2. **Sejahtera,** Terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir atau batin secara adil dan merata. Beberapa indikator ukuran kesejahteraan masyarakat antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkualitas.
3. **Mandiri dan Berdaya Saing**, Suatu keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat mampu mengelola, mendayagunakan dan menjaga potensi yang ada dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial budaya dengan tidak tergantung dari sumberdaya dari luar. Kemampuan beradaptasi dan terbuka pada perubahan jaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai dan norma luhur, budaya serta kearifan lokal sehingga tetap mempunyai jati diri sebagai masyarakat Kabupaten Buton. Sikap mandiri ditunjukkan juga dengan kebanggaan pemerintah dan masyarakat untuk menggunakan produk dan hasil budidaya lokal yang menjadi ciri khas daerah. Visi ini juga Mengandung makna kemampuan daerah (pemerintah dan masyarakat) dengan sumberdaya yang dimiliki mampu menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa, kualitas pelayanan, kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang unggul dan mempunyai nilai sehingga dihargai karena memberikan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan daya saing tersebut akan menjadi keunggulan daerah dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sehingga keunggulan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

4. **Pembangunan Berkelanjutan**, Suatu keberlanjutan dimaknai kemampuan daerah untuk berpikir kedepan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Kemampuan dan kualitas dari sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian sumber daya yang dimiliki untuk keberlangsungan kehidupan dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang untuk menjadi lebih baik.

2. Misi

Dalam upaya mengoperasionalkan visi tersebut dan Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2029, akan dicapai melalui 4 (empat) Misi pembangunan yang ditetapkan sebagai CATUR CITA sebagai berikut:

1) **MISI 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya**, bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling menghormati dan menghargai, aman, dan tertib, dengan menjadikan nilai dan norma-norma luhur dari masing-masing individu pemeluk agama dan kepercayaan, dan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat identitas budaya daerah.
2) **MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat**, berfokus pada penguatan di bidang pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Di bidang kesehatan, misi ini bertujuan untuk

meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas guna menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Penguatan kesetaraan gender menjadi kunci dalam menciptakan keadilan sosial dan kesempatan yang sama dalam berbagai sektor. Selain itu, upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan dan sistem sosial yang adaptif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

3) **MISI 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**, Misi ini Diwujudkan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) berkualitas untuk mendukung aktivitas perekonomian yang mampu meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ekosistem lingkungan melalui upaya penurunan risiko bencana dengan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta dampak aktivitas ekonomi.
4) **MISI 4: Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal**, misi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan keunggulan lokal. Kabupaten Buton memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan pariwisata, pertambangan dan industri pengolahan. Pengembangan potensi dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan memberdayakan seluruh masyarakat Buton melalui peningkatan skill serta memberikan perlindungan pekerja. Hal ini mampu mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 1 Keterkaitan Antara Misi RPJMD Kabupaten Buton dengan Misi RPJMN dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Buton dari masing-masing tujuan dalam rumusan

yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Tujuan 1: Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama
   - Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan
   - Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

2. **Tujuan 2: Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

3. **Tujuan 3: Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan.
   - Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
   - Meningkatnya kualitas keluarga yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat
   - Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

4. **Tujuan 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat

5. **Tujuan 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman berbasis lingkungan yang asri dan ketahanan bencana** Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

- Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah

5. **Tujuan 6: Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan**

   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas
   - Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah

6. **Tujuan 7: Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat**

   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
   - Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA
   - Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah
   - Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD 2025–2029, maka LKjIP Kab.Buton tahun 2025 menggambarkan pencapaian sasaran dalam 2(dua) periode yakni periode awal dimana Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab.Buton Tahun 2023-2026 yang digunakan selama masa transisi, dan periode akhir yakni Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buton terpilih periode 2025-2030.

Tujuan dan sasaran Pemkab.Buton sebagaimana termuat dalam RPD Kab.Buton Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Buton 2023-2026

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
Misi 1 : Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan								
T1 : Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan		Laju pertumbuhan ekonomi	%	-0,54 (2020)	1,29 - 3	1,90 - 4.5	2,51 - 5	3,12 - 5,5
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	68,45 (2021)	73,16	73,48	73,80	74,12
	Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	-1,07 (2020)	3,7 – 4,2	3,8 – 4,5	4,0 – 5,0	4,1 – 5,3
		Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian	%	-0,24 (2020)	0,02 – 0,19	0,2 – 0,29	0,3 – 0,8	0,9 -1,5
		Laju pertumbuhan ekonomi sektor	%	-2,37 (2020)	7,76 -8,3	7,85 – 8,5	8,0 -9,6	9,6 – 12,6

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
		perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor						
	Sasaran 2 : Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan	Indeks kualitas air	Nilai	35,94 (2020)	53,35	53,45	53,65	53,75
		Indeks kualitas udara	Nilai	91,98 (2020)	87,37	87,48	87,80	87,81
		Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	80,92 (2020)	80,87	81,99	84,26	85,40
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas								
Tujuan 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia	Nilai	66,32 (2021)	66,91	67,23	67,54	67,85
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,76 (2021)	13,78	13,79	13,8	13,81

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
	pendidikan dan kesehatan							
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,92 (2021)	8,33	8.53	8,74	8,94
		Angka harapan hidup	Tahun	68,39 (2021)	69,24	69,58	69,91	70,24
	Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan	%	13,93 (2021)	13,92 - 12,83	12,82 - 12,54	12,53 – 12,26	12,25 – 11,98
		Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	26,5 (2020)	26,6 – 28,89	28,90 – 29,60	29,70 -30,5	30,60 – 31,30
		Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7.324 (2021)	7.358	7.375	7.392	7.409
		Gini ratio	Nilai	0,4 (2021)	0,4 -0,33	0,33 – 0,26	0,26 – 0,19	0,19 – 0,12
		Tingkat pengangguran terbuka	%	4,74 (2012)	4,74 – 3,97	3,97 -3,50	3,50 – 3,40	3,39 – 3,20

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
	Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	218,12 (2021) (Inisial)	218,12 - 350,00 (Inisial)	350,00 – 380,00 (Inisial)	380,00 – 450,00 (Inisial)	450,00 – 550,00 (Inisial)
		Indeks pembangunan gender	%	79,82 (2019)	80,22	81,22	81,32	81,42
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	97,52 (2020)	97,52	98,51	99,01	100
		Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100 (2020)	100	100	100	100
Misi 3 : Mewujudkan good governance dan clean goverment pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan								

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
hukum								
Tujuan 3 : Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab	Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi	Nilai (Kategori)	48,63 (C) (2021)	51 – 60 (CC)	60 -70 (B)	60 -71 (B)	60 – 72 (B)
		Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	61,08 (B) (2021)	62 – 70 (B)	62 -71 (B)	62 – 72 (B)	62 – 73 (B)
		Opini BPK	Kategori	WTP (2020)	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks kepuasan masyarakat	%	17,02 (2020)	17,05 – 25	25 – 26,5	26,5 -30	30 -35
	Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	78,31 (2020)	80,72	83,13	85,54	87,95

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
	pemerintahan desa							
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari								
Tujuan 4 : Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton		Persentase benda, situs dan bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	18,00 (2020)	22	26	30	34
		Angka kriminalitas yang tertangani	Nilai	6,60 (2020)	5,80	5,30	4,82	3,96
	Sasaran 8 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	57,83 (2020)	60,24	62,65	65,06	67,47

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
	local							
	Sasaran 9 : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	76,32 (2020)	62,48	57,86	53,25	48,64
		Persentase ormas aktif	%	83,87	100	100	100	100
Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan								
Tujuan 5 : Mewujudkan konektivtas antar wilayah	Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks konektivitas	Nilai	0,86 (2020)	1	1,14	1,14	1,14
		Indeks infrastrukur wilayah	%	29,26 (2020)	29,87	30,48	31,08	31,69
	Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi	Rasio elektrifikasi	%	88,07 (2020)	91	94	97	100

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Data Awal	Target			
					2023	2024	2025	2026
	listrik							

Sementara itu berdasarkan rumusan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buton yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 – 2030 adalah:

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten ButonTahun 2025-2030

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"												
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MISI 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius,	**Tujuan 1.** Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat		Indeks Religius Buton	Poin	79,51	80,59	81,67	82,75	83,85	84,94	
		Sasaran 1.1 Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	88,13	88,50	88,88	89,25	89,63	90,00	
		Sasaran 1.2 Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	53,40	54,01	54,61	55,22	55,82	56,43	

kondusif dan berbudaya.		Sasaran 1.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	*Crime Rate*	Per 100,000 Pddk	80,00	78,00	76,00	74,00	72,00	70,00	
	Tujuan 2. Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,04	63,25	64,46	65,67	66,88	68,09	
		Sasaran 2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton	Nilai SAKIP Kabupaten Buton	Poin	65,00	70,50	73,02	76,02	78,02	80,52	
MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	**Tujuan 3.** Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,01	70,27	70,53	70,78	71,04	71,31	
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	78,11	78,20	78,36	78,45	78,58	78,70	
		Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	77,81	77,97	78,14	78,30	78,46	78,62	

VISI :
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas keluarga yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,1	62,4	63,6	64,9	66,2	67,5	
		Sasaran 3.4 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,459	0,448	0,438	0,427	0,417	0,407	
	Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		PDRB per Kapita	Juta Rupiah/ Kapita	42,88	44,29	45,65	46,98	48,27	49,54	

		Sasaran 4.1 Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	13,04	13,00	12,65	11,86	11,47	11,08	
			Rasio Gini	Poin	0,312	0,311	0,310	0,309	0,308	0,307	
MISI 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	**Tujuan 5:** Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tahan bencana		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	35,00	19,55	22,42	25,28	28,14	31,00	
			Indeks Risiko Bencana	Poin	148,81	147,32	145,83	144,34	142,85	141,36	
		Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	83,79	83,96	84,14	84,31	84,48	84,65	
		Sasaran 5.2 Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,38	0,39	0,40	0,45	0,54	0,57	
	Tujuan 6: Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan		Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton	%	65,22	66,495	67,76	69,275	71,295	73,495	
		Sasaran 6.1 Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	%	55,51	57,28	58,91	60,87	63,16	66,27	

VISI :
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Sasaran 6.2 Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	74,93	75,71	76,61	77,68	79,43	80,72	
MISI 4: Meningkatkan	**Tujuan 7.** Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,03	4,09	4,15	4,22	4,24	4,36	

ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal	meningkatkan pendapatan masyarakat		Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,46	3,53	3,61	3,69	3,77	3,84	
		Sasaran 7.1 Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.	3.346,59	3.528,89	3.710,16	3.891,46	4.071,33	4.251,07	
			Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	%	21,27	21,48	21,70	21,91	22,13	22,34	
			Indeks Ekonomi Biru	Poin	49,72	51,66	53,61	55,55	57,49	59,43	
		Sasaran 7.2 Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	2,89	3,05	3,21	3,36	3,52	3,68	
		Sasaran 7.3 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	3,02	3,10	3,17	3,25	3,33	3,41	
		Sasaran 7.4 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,83	2,40	2,38	2,36	2,34	2,32	

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perencanaan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan transisi. Dokumen perencanaan transisi ini berlaku disemua Pemerintah Daerah di Indonesia. Selanjutnya berikut ini akan diuraikan penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton tahun 2025-2029, dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton

RPJMD 2025-2029		RPD 2023-2026	
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**
Tujuan 1. Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat	Indeks religius Buton	Tujuan 4. Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton	Angka kriminalitas yang tertangani
Sasaran 1.1 Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	Sasaran 4.2 Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan
Sasaran 1.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	*Crime rate*		Persentase ormas aktif
Sasaran 1.2 Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Indeks pembangunan kebudayaan	Sasaran 4.1 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan
Tujuan 2. Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan berpedoman pada nilai religius	Indeks reformasi birokrasi	Tujuan 3. Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (*good governance*), berkualitas dan bertanggung jawab.	Indeks reformasi birokrasi
Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten Buton	Sasaran 3.1 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan	Nilai SAKIP kabupaten
			Indeks kepuasan masyarakat
			Opini BPK

RPJMD 2025-2029		RPD 2023-2026	
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**
		pemerintahan daerah	
		Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase indeks desa membangun (Berkembang)
Tujuan 3. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks pembangunan manusia	Tujuan 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia
Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks pendidikan	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka harapan lama sekolah
			Rata-rata Lama sekolah
		Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan
			Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional
Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka harapan hidup
Sasaran 3.4 Meningkatnya kualitas keluarga yang sesuai norma keidupan masyarakat	Indeks pembangunan kualitas keluarga (iBangga)	Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Kategori kabupaten layak anak
Sasaran 3.5 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks ketimpangan gender		Indeks pembangunan gender

RPJMD 2025-2029		RPD 2023-2026	
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**
Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PRDB per Kapita	Tujuan 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia
Sasaran 4.1 Penurunan Penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan	Tingkat kemiskinan	Sasaran 2.2 Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan
	Rasio gini		Gini ratio
			Pendapatan perkapita
			Pengeluan perkapita
Tujuan 5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman berbasis lingkungan yang asri dan ketahanan bencana	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Tujuan 1. Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup
	Indeks resiko bencana		
Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Sasaran 1.2 Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Indeks kualitas air
			Indeks kualitas udara
			Indeks tutupan lahan
Sasaran 5.2 Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks ketahanan daerah		
Tujuan 6. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton	Tujuan 5. Mewujudkan konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas
Sasaran 6.1 Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas dasar (infrastruktur dasar) berkualitas	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	Sasaran 5.1 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks Infrastruktur wilayah
Sasaran 6.2 Meningkatnya pemerataan sarana	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Sasaran 5.2 Meningkatnya ketersediaan energi	Rasio elektrifikasi

RPJMD 2025-2029		RPD 2023-2026	
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**
dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah		Listrik	
Tujuan 7. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	Tujuan 1. Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan ekonomi
	Indeks daya saing daerah	Tujuan 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia
Sasaran 7.1 Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	Kontribusi seluruhsektor PDRB selain pertambangan dan penggalian	Sasaran 1.1 Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
	Kontribusi PDRB kategori pertanian		Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian
	Indeks ekonomi biru		Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
Sasaran 7.2 Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA	Kontribusi PDRB kategori industri pengolahan		
Sasaran 7.3 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara		
Sasaran 7.4 Terjaganya daya beli ekonomi masyarakat	Tingkat inflasi		
Sasaran 7.5 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat pengangguran terbuka	Sasaran 2.2 Menurunnya angka kemiskinan daerah	Tingkat pengangguran terbuka

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah akan diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dengan target yang akan dicapai per satu tahun periode perencanaan. Adapun target tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton untuk tahun 2025 pada perubahan RKPD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Buton pada Perubahan RKPD Tahun 2025

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"					
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**TARGET**
MISI 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good dovernance), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya	Tujuan 1. Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat		Indeks Religius Buton	Poin	79,51
		Sasaran 1.1 Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	88,13
		Sasaran 1.2 Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	53,7
		Sasaran 1.2 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	*Crime Rate*	Per 100.000 Penduduk	80
	Tujuan 2. Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	55,81

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"					
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**TARGET**
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten Buton	Poin	65
MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Tujuan 3. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,01
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	78,11
		Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	77,81
		Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas keluarga sesuai yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	70,19
		Sasaran 3.4 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,459
	Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat		PDRB per Kapita	Juta Rupiah/ Kapita	42,88
		Sasaran 4.1 Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	13
			Rasio Gini	Poin	0,312

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"					
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**TARGET**
MISI 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Tujuan 5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman berbasis lingkungan yang asri dan ketahanan bencana		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	35
			Indeks Risiko Bencana	Poin	132,14
		Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	83,79
		Sasaran 5.2 Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Ketahanan Bencana	Poin	0,3
	Tujuan 6. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan		Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton	%	55,64
		Sasaran 6.1Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas dasar (infrastruktur dasar) berkualitas	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	%	55,51
		Sasaran 6.2 Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	0,266
MISI 4: Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi	Tujuan 7. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,03
			Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,46

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"					
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**TARGET**
lokal		Sasaran 7.1 Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berasis pemanfaatan SDA	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB selain pertambangan dan penggalian	%	3.637.685
			Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	Poin	21,27
			Indeks Ekonomi Biru	Poin	49,72
		Sasaran 7.2 Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis SDA	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	2,89
		Sasaran 7.3 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	3,02
		Sasaran 7.4 Terjaganya daya beli ekonomi Masyarakat	Tingkat Inflasi	%	2±1
		Sasaran 7.5 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,83

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Buton mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan

mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi. Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan.

Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pada pembangunan jangka menengah, Kabupaten Buton memiliki fokus dalam meningkatkan penguatan fondasi transformasi. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, perekonomian, infrastruktur, serta tata kelola di Kabupaten Buton. Strategi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN		
MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang		

religius, kondusif dan berbudaya.		
Tujuan 1 : Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Penguatan peran lembaga keagamaan dan sosial serta penguatan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama
	Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Meningkatkan pelestarian terhadap nilai budaya dan kearifan lokal
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Penguatan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat
VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 : Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas	Sasaran 2.1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan
		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi berbasis inovasi dan digitalisasi
MISI 2 : Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat		
Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia	Sasaran 3.1 : Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak
	Sasaran 3.2 : Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan menuju masyarakat berkehidupan layak
	Sasaran 3.3 : Meningkatnya kualitas keluarga yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat	Penguatan komunikasi dan keharmonisan keluarga
	Sasaran 3.4 : Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Penguatan pengharusutamaan gender
Tujuan 4 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Sasaran 4.1 : Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Penuntasan kemiskinan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial adaptif Integratif

MISI 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		
Tujuan 5 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman berbasis lingkungan yang asri dan ketahanan bencana	Sasaran 5.1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup
	Sasaran 5.2 : Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	
Tujuan 6 : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan	Sasaran 6.1 : Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas	Peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik
	Sasaran 6.2 : Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	
MISI 4 : Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal		
Tujuan 7 : Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat	Sasaran 7.1 : Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
	Sasaran 7.2 : Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA	
	Sasaran 7.3 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan kualitas pendampingan kewirausahaan daerah berbasis sektor UMKM baik pemberdayaan, permodalan, pengembangan produk hingga pemasaran
	Sasaran 7.4 : Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkualitas	Peningkatan tenaga kerja yang produktif dan sesuai kondisi pasar kerja

Penjabaran strategi pembangunan dalam mendukung pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton akan dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya.

a. Penguatan peran lembaga keagamaan dan sosial serta penguatan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama

Pembangunan Manusia dibidang keagamaan sangat penting dari segala pelaksanaan bidang-bidang lainnya, hal ini merupakan kodrat dalam kehidupan manusia sebagai arah tujuan kehidupan manusia di dunia. Salah satu manivestasi kehidupan yang mendukung kehidupan antar manusia tentu harus didasarkan pada ahlak, keimanan dan ketaqwaan serta nilai-nilai agama untuk mendukung kehidupan dunia yang hakiki. Pentingnya pembinaan pelayanan kehidupan beragama selain merupakan hal yang didasarkan untuk meingkatkan kualitas hidup beragama, juga merupakan kesadaran dari masinng-masing individu dalam meningkatkan kualitas beragama. Selain itu juga pemerintah harus ikut memberikan perhatian khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, melaksanakan program religius keagamaan baik disekolah, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan ruang-ruang komunitas, maupun menunjang sarana dan prasarana keagamaan sebagai wujud dari peran pemerintah utuk mendukung kualitas pelayanan kehidupan beragama. Strategi ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang kondusif, yang ditandai dengan suasana aman, harmonis, dan penuh rasa saling menghormati dalam keberagaman. Dengan adanya sinergi ini, masyarakat dapat bersatu dalam keragaman dan mencapai keadilan bagi semua.

b. Meningkatkan pelestarian terhadap nilai budaya dan kearifan lokal

Strategi pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal memiliki peran krusial dalam mewujudkan masyarakat yang religius, kondusif, dan berbudaya karena nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai fondasi moral, menjaga keharmonisan sosial,

memperkuat identitas, dan menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik. Untuk meningkatkan pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, seperti Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial, penguatan pendidikan budaya dan revitalisasi nilai budaya, dan pegelolaan warisan budaya melalui peningkatan sarana dan fasilitasi kegiatan seni budaya masyarakat, serta penguatan peran lembaga adat/tokoh adat/lembaga kesenian dan masyarakat dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya sangatlah penting untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan kekayaan budaya lokal. Selain itu, pelestarian terhadap benda cagar budaya sebagai bagian dari warisan budaya harus dilakukan, karena benda cagar budaya memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan

c. Penguatan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas. Upaya menjaga ketertiban, ketenteraman di Kabupaten Buton selalu menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan kenyamanan masyarakat. Kondisi yang aman dan tenteram akan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan untuk memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan bersama dengan mengintegrasikan visi dan misi

pada masing-masing lembaga merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Koordinasi yang dilakukan meliputi : upaya menjaga keamanan wilayah tetap kondusif dalam kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan tetap menjaga norma-norma dalam masyarakat serta norma hukum yang berlaku. Upaya lain yang harus dilakukan yaitu menekan kriminalitas dan aksi-aksi lain yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga dengan situasi yang kondusif dapat menciptakan iklim yang sejuk, rasa aman, kehidupan masyarakat yang harmonis, perlindungan terhadap hak-hak sipil terjaga dan program-program pembangunan di Kabupaten Buton dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target.

d. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan

   Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan, strategi utama yang dapat diterapkan adalah optimalisasi sinkronisasi dan integrasi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan adanya koordinasi yang kuat, Pemerintah Kabupaten Buton mampu menghindari tumpang tindih program serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran. Langkah ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan prinsip relevansi pembangunan yang mengedepankan kebutuhan nyata masyarakat.

e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi berbasis inovasi dan digitalisasi

Strategi Kabupaten Buton dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik diarahkan pada percepatan pembangunan pusat pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis digital, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif. Arah kebijakan yang mendukung strategi ini mencakup pengembangan *smart government* melalui penguatan kapasitas aparatur dan lembaga daerah dalam manajemen data, keamanan informasi, serta pengelolaan aset secara digital, disertai peningkatan kompetensi SDM ASN di bidang teknologi informasi. Transparansi juga diperkuat melalui digitalisasi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa, serta pelayanan perizinan yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, strategi ini mendorong penguatan integritas partai politik sebagai pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, sehingga secara keseluruhan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih inovatif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat

a. Meningkatkan kualitas pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak

Arah pembangunan harus berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, karena investasi pada manusia merupakan modal utama untuk mendorong kemajuan daerah. Dalam sektor pendidikan di Kabupaten Buton perlu difokuskan pada penyediaan layanan dasar yang merata dan berkualitas, terutama di wilayah terpencil dan kurang terjangkau. Karena itu, pemerataan akses pendidikan berkualitas, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan melalui dipandang sangat penting untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Disamping itu pula peningkatan kualitas pemuda dan olahraga berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pelatihan, pendidikan, serta kegiatan olahraga yang terstruktur, yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi.

b. Meningkatkan kualitas Kesehatan menuju masyarakat berkehidupan layak Pembangunan dibidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu

investasi dalam kaitaannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pentingnya kesehatan harus mulai disadari oleh masyarakat, karena dengan kondisi kesehatan yang prima masyarakat akan mampu melakukan segala aktivitas dengan optimal. Selain itu, kesadaran yang tinggi tentang kesehatan akan menggiring masyarakat pada pola hidup sehat, yang akan berdampak pada produktivitas kerja masyarakat. Sejalan dengan itu, layanan kesehatan juga harus diperluas secara merata, terutama di wilayah terpencil, dengan menambah tenaga medis, memperbaiki fasilitas, serta menguatkan program promotif dan preventif agar masyarakat memperoleh hak dasar kesehatan secara optimal.

c. Penguatan komunikasi dan keharmonisan keluarga

Strategi penguatan komunikasi dan keharmonisan keluarga diarahkan pada peningkatan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dimana Keluarga memainkan peran fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual, memberikan pendidikan awal dan dukungan emosional, serta mengajarkan keterampilan praktis yang membentuk pribadi individu yang lebih baik. Melalui fungsi-fungsi ini, keluarga menciptakan fondasi bagi SDM yang bermoral, produktif, dan mandiri, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

d. Penguatan pengharusutamaan gender

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan pelindungannya. Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan kemampuan disegala bidang. Pada hakekatnya sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada

pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan, selain itu perempuan ini adalah pencetak generasi penerus bangsa. Dengan sumber daya perempuan yang berkualitas akan menciptakan generasi/anak-anak yang berkualitas.

e. Pengentasan kemiskinan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial adaptif integratif

Strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buton perlu diarahkan pada penerapan satu sistem pendataan yang terintegrasi dan akurat melalui pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), yang sebelumnya menggunakan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK). Sistem ini menjadi landasan penting untuk merancang kebijakan berbasis data yang tepat sasaran, sehingga program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan memanfaatkan DTSEN, pemerintah daerah dapat menghindari duplikasi bantuan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperluas cakupan penerima manfaat. Sistem ini juga mendukung perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat, sehingga pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan perlu diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Selain itu, program perlindungan sosial harus mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi darurat maupun perubahan sosial, seperti bencana alam, pandemi, atau gejolak ekonomi. Integrasi program bantuan sosial lintas sektor mulai dari bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi akan menciptakan

ekosistem perlindungan yang holistik dan inklusif. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Langkah ini juga dipandang penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh Kabupaten Buton.

MISI 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

a. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup

Strategi optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Buton harus dimulai dengan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap proyek pembangunan, baik infrastruktur maupun ekonomi, dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat dan diterapkan secara konsisten.

Disamping itu penguatan regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, seperti penebangan hutan, penambangan, atau reklamasi pantai, menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekologis. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kekayaan alam Kabupaten Buton, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan yang asri dan lestari secara partisipatif menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Melalui edukasi dan pelatihan tentang praktik ramah lingkungan, seperti pertanian organik, pengelolaan sampah terpadu, dan konservasi sumber daya air, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Pemerintah daerah juga dapat mendorong pemanfaatan teknologi ramah

lingkungan di sektor publik dan swasta, termasuk penggunaan energi terbarukan dan sistem transportasi yang efisien.

b. Peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik

Strategi peningkatan aksesibilitas pembangunan di Kabupaten Buton harus difokuskan pada penguatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan transportasi umum yang terintegrasi. Dengan memperluas dan memperbaiki jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi barang akan menjadi lebih efisien, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di kawasan-kawasan perekonomian baru dan daerah terpencil.

Pemerintah daerah juga dapat mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan, perikanan dan pertanian berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman dan infrastruktur pelayanan publik, menjadi komponen penting untuk menciptakan lingkungan hidup yang layak dan sehat bagi masyarakat. Pembangunan perumahan yang memadai, sistem air bersih dan sanitasi yang baik, serta akses terhadap listrik dan layanan publik lainnya harus dilakukan secara merata, khususnya di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Pemerintah Kabupaten Buton juga perlu mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap pembangunan permukiman, seperti penggunaan material ramah lingkungan dan penataan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim.

MISI 4 : Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal

a. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

Strategi peningkatan hilirisasi potensi sumber daya alam (SDA) unggulan di Kabupaten Buton merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi lanjutan yang sebelumnya kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan ekonomi dasar, dan kurang memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai momentum pertumbuhan yang tinggi, maka perlu pula dilakukan langkah-langkah strategis, yaitu : menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dengan menggali potensi sektor-sektor unggulan daerah khususnya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, meningkatkan kapasitas produksi melalui optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana produksi, dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah.

Peningkatan hilirisasi potensi unggulan SDA di Kabupaten Buton harus mengedepankan pendekatan inovatif yang selaras dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, pengembangan sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, pariwisata dan hasil tambang harus diarahkan pada pengolahan yang berbasis teknologi bersih guna meningkatkan nilai tambah produk tanpa merusak lingkungan. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi pada sektor hulu dan hilir melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal dan pelatihan kepada masyarakat agar mampu terlibat aktif dalam rantai produksi. Dalam hal ini pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis kluster dengan dukungan teknologi digital.

Selain menciptakan lapangan kerja, strategi ini juga akan memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan menjaga keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Di sisi lain, keberhasilan hilirisasi SDA juga sangat bergantung pada penerimaan sosial masyarakat terhadap transformasi ekonomi yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kearifan lokal, pola kehidupan tradisional, serta struktur sosial budaya yang telah mengakar. Pemerintah Kabupaten Buton dapat memfasilitasi

dialog terbuka antara pelaku industri, tokoh adat, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

b. Peningkatan kualitas pendampingan kewirausahaan daerah berbasis sektor UMKM baik pemberdayaan, permodalan, pengembangan produk hingga pemasaran

Untuk mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi dan penciptaan peluang kerja berbasis potensi unggulan daerah, maka potensi kelautan, perikanan, pertanian, dan sumber daya lokal lainnya harus dioptimalkan melalui pendekatan ekonomi biru, hilirisasi produk, serta penguatan industri pengolahan. UMKM dan koperasi diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang perlu diperkuat dengan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meningkatkan kontribusi sektor produktif terhadap PDRB, sekaligus membuka lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Buton.

Strategi Kabupaten Buton dalam meningkatkan kualitas pendampingan kewirausahaan daerah difokuskan pada penguatan sektor UMKM secara menyeluruh, mulai dari pemberdayaan masyarakat, akses permodalan, pengembangan produk, hingga perluasan jangkauan pemasaran. Strategi ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan lokal yang kompeten dan mandiri, melalui program- program peningkatan kapasitas dan keterampilan kewirausahaan. Arah kebijakan yang mendasarinya mencakup peningkatan keterkaitan UMKM dengan rantai nilai industri domestik dan global, dengan memberikan kemudahan akses terhadap sumber daya produktif, termasuk pembiayaan, teknologi, serta penguatan kemitraan usaha. Dengan demikian, diharapkan UMKM di Kabupaten Buton dapat berkembang secara berkelanjutan, berdaya saing tinggi, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

c. Peningkatan tenaga kerja yang produktif dan sesuai kondisi pasar kerja

Strategi Kabupaten Buton dalam peningkatan tenaga kerja yang produktif dan sesuai dengan kondisi pasar kerja diarahkan pada pengembangan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang selaras dengan potensi wilayah serta kebutuhan dunia usaha. Melalui peningkatan keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi, dan fasilitasi sertifikasi kerja, pemerintah daerah berupaya menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan memiliki daya saing tinggi. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pelatihan kerja yang relevan dengan perkembangan sektor unggulan daerah, sehingga mendorong terciptanya lapangan kerja yang produktif serta memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Buton pada tahun 2025 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja

yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja.

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan RPJMD 2025–2029, dengan ini Pemerintah Kabupaten Buton menetapkan Perjanjian Kinerja dalam 2(dua) periode yakni Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab.Buton Tahun 2023-2026 yang digunakan selama masa transisi, dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	4,37
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian	%	3,31
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	8,51
Sasaran 2 : Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan	Indeks kualitas air	Nilai	78,05
	Indeks kualitas udara	Nilai	87,51
	Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	86,78

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,90
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,99
	Angka harapan hidup	Tahun	68,76
Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan	%	13,04
	Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	46,40
	Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7,885
	Gini ratio	Nilai	0,312
	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,38
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	750,00
	Indeks pembangunan gender	%	83,29
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	99,01
	Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	62
	Opini BPK	Kategori	WTP
	Indeks kepuasan masyarakat	%	30

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	85,54
Sasaran 8 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan local	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	100
Sasaran 9 : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	53,25
	Persentase ormas aktif	%	100
Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks infrastrukur wilayah	%	31,08
Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	99,75

Tabel 2. 7 Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	88,13
2.	Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,40
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	3. Crime Rate	80,00

4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton	1.	Nilai SAKIP Kabupaten Buton	65,00
5.	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	1.	Indeks Pendidikan	78,11
6.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	1.	Indeks Kesehatan	77,81
7.	Meningkatnya kualitas keluarga yang Sejahtera dan sesuai norma kehidupan Masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,1
8.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan	1.	Indeks Ketimpangan Gender	0,459
9.	Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	1.	Tingkat Kemiskinan	13,04
		2.	Rasio Gini	0,312
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,79
11.	Meningkatnya ketangguhandantanggap bencanawilayah	1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,38
12.	Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar(Infrastruktur Dasar) berkualitas	1.	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	55,51
13.	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana Pembangunan di seluruh wilayah	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	74,93

14.	Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	1.	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	3,346,59
		2.	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	21,27
		3.	Indeks Ekonomi Biru	49,72
15.	Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA	1.	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	2,89
16.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	1.	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	3,02
17.	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,83

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1) Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

2) Rumus 2 : Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA
1	91<	Sangat Tinggi
2	76 < 90	Tinggi
3	66 < 75	Sedang
4	51 < 65	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 (data diolah)

Pemerintah Kabupaten Buton melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah telah melaksanakan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Pemerintah Kabupaten Buton telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 di periode awal pada masa transisi dan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A.1 Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan RPD 2023-2026

A.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Dibandingkan Target perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	4,37	2,58	59,03	Rendah
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian	%	3,31	(3,70)	(111,78)	Sangat Rendah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	8,51	11,39	133,84	Sangat Tinggi
Sasaran 2 : Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan	Indeks kualitas air	Nilai	78,05	85,23	109,19	Sangat Tinggi
	Indeks kualitas udara	Nilai	87,51	85,22	97,38	Sangat Tinggi
	Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	86,78	86,27	99,41	Sangat Tinggi
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,90	13,97	100,50	Sangat Tinggi
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,99	8,69	96,66	Sangat Tinggi
	Angka harapan hidup	Tahun	68,76	70,66	102,76	Sangat Tinggi
Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan	%	13,04	13,46	103,22	Sangat Tinggi
	Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	46,40	43,41**	93,55	Sangat Tinggi
	Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7,885	8.607	109,15	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
	Gini ratio	Nilai	0,312	0,35	87,82	Tinggi
	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,38	3,30	61,34	Rendah
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	750,00	566,56	75,54	Sedang
	Indeks pembangunan gender	%	83,29	82,07**	98,53	Sangat Tinggi
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	99,01	6,24	6,30	Sangat Rendah
	Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100	14,71	14,71	Sangat Rendah
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi	Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	62	63,73	102,79	Sangat Tinggi
	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan masyarakat	%	30	90,39	301,3	Sangat Tinggi
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	85,54	68,76	80,38	Tinggi
Sasaran 8 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Sasaran 9 : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	53,25	73,59	138,19	Sangat Tinggi
	Persentase ormas aktif	%	100	67,5	67,5	Sedang
Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan	Indeks infrastrukur wilayah	%	31,08	29,26	94,14	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata						
Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	99,75	91,67	91,89	Sangat Tinggi

Catatan :

- ** = Data Tahun 2024
- * = Data Sementara
- … = Data tidak tersedia
- ( ) = Minus

A.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				Capaian Tahun 2024
		Target	Realisasi	(%)	Skor	(%)
Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	4,37	2,58	59,03	Rendah	74,47
Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian	%	3,31	(3,70)	(111,78)	Sangat Rendah	-2.865
Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	8,51	11,39	133,84	Sangat Tinggi	87,38
Indeks kualitas air	Nilai	78,05	85,23	109,19	Sangat Tinggi	116,93
Indeks kualitas udara	Nilai	87,51	85,22	97,38	Sangat Tinggi	108,58
Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	86,78	86,27	99,41	Sangat Tinggi	99,87
Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,90	13,97	100,50	Sangat Tinggi	100,72
Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,99	8,69	96,66	Sangat Tinggi	101,17

Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				Capaian Tahun 2024
		Target	Realisasi	(%)	Skor	(%)
Angka harapan hidup	Tahun	68,76	70,66	102,76	Sangat Tinggi	101,27
Angka kemiskinan	%	13,04	13,46	103,22	Sangat Tinggi	87,59
Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	46,40	43,41**	93,55	Sangat Tinggi	150,20
Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7,885	8.607	109,15	Sangat Tinggi	113,91
Gini ratio	Nilai	0,312	0,35	87,82	Tinggi	100,60
Tingkat pengangguran terbuka	%	2,38	3,30	61,34	Rendah	125,69
Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	750,00	566,56	75,54	Sedang	212,85
Indeks pembangunan gender	%	83,29	82,07**	98,53	Sangat Tinggi	101,04
Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	99,01	6,24	6,30	Sangat Rendah	10,87
Persentase cabang olahraga yang	%	100	14,71	14,71	Sangat	8,82

Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				Capaian Tahun 2024
		Target	Realisasi	(%)	Skor	(%)
terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional					Rendah	
Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	62	63,73	102,79	Sangat Tinggi	89,43
Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	100
Indeks kepuasan masyarakat	%	30	90,39	301,3	Sangat Tinggi	364,4
Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	85,54	68,76	80,38	Tinggi	87,11
Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	Sangat Tinggi	166
Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	53,25	73,59	138,19	Sangat Tinggi	79,05
Persentase ormas aktif	%	100	67,5	67,5	Sedang	52,63
Indeks infrastrukur wilayah	%	31,08	29,26	94,14	Sangat Tinggi	95,99
Rasio elektrifikasi	%	99,75	91,67	91,89	Sangat	104,26

Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				Capaian Tahun 2024
		Target	Realisasi	(%)	Skor	(%)
					Tinggi	

A.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir dalam rencana pembangunan jangka menengah dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir Dalam Rencana Pembangunan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025 terhadap Target 2026 (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	5,3	2,58	48,68
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian	%	1,5	(3,70)	(246,67)
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	12,6	11,39	90,40

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025 terhadap Target 2026 (%)
Sasaran 2 : Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan	Indeks kualitas air	Nilai	53,75	85,23	158,57
	Indeks kualitas udara	Nilai	87,81	85,22	97,05
	Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	85,40	86,27	101,02
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,81	13,97	101,16
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,94	8,69	97,20
	Angka harapan hidup	Tahun	70,24	70,66	100,60
Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan	%	11,98	13,46	87,64
	Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	31,30	43,41**	138,69
	Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7.409	8.607	116,17
	Gini ratio	Nilai	0,12	0,35	(191,66)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025 terhadap Target 2026 (%)
	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,20	3,30	96,87
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	550,00 (Pratama)	566,56**	103,01
	Indeks pembangunan gender	%	81,42	82,07	100,80
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	100	6,24	6,24
	Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100	14,71	14,71

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025 terhadap Target 2026 (%)
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	73 (B)	63,73	87,30
	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	100
	Indeks kepuasan masyarakat	%	35	90,39	258,26
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	87,95	68,76	78,18
Sasaran 8 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	67,47	100	148,21
Sasaran 9 : Terciptanya	Persentase penyelesaian	%	48,64	73,59	151,30

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025 terhadap Target 2026 (%)
keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	tindak kejahatan				
	Persentase ormas aktif	%	100	67,5	67,50
Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks infrastrukur wilayah	%	31,08	29,26	94,14
Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	100	91,67	91,67

A.2 Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2030

A.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Dibandingkan Target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
Sasaran 1 : Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	88,13	87,3	99,03	Sangat Tinggi
Sasaran 2 : Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	53,40	…	-	-
Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Crime Rate	Per 100.000 Pddk	80,00	188,69	(35,86)	Sangat Rendah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton	Nilai SAKIP Kabupaten Buton	Poin	65,00	63,73	98,04	Sangat Tinggi
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	78,11	22,66	28,75	Rendah
Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	77,81	77,65**	99,79	Sangat Tinggi
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas keluarga yang Sejahtera dan sesuai norma kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,1	64,2	105,07	Sangat Tinggi
Sasaran 8 : Meningkatnya kesetaraan dan	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,459	0,518**	87,14	Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
keadilan gender dalam Pembangunan						
Sasaran 9 : Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	13,04	13,46	96,77	Sangat Tinggi
	Rasio Gini	Poin	0,312	0,35	87,82	Tinggi
Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	83,79	85,46	101,99	Sangat Tinggi
Sasaran 11 : Meningkatnya ketangguhandantanggap bencanawilayah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,38	0,40*	105,26	Sangat Tinggi
Sasaran 12 : Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	%	55,51	68,67	123,70	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
utilitas dasar(Infrastruktur Dasar) berkualitas						
Sasaran 13 : Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana Pembangunan di seluruh wilayah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	74,93	79,67	106,32	Sangat Tinggi
Sasaran 14 : Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.	3,346,59	3,788,50	113,20	Sangat Tinggi
	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	%	21,27	22,13	104,04	Sangat Tinggi
	Indeks Ekonomi Biru	Poin	49,72	…	-	-
Sasaran 15 : Meningkatnya hilirisasi produk unggulan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	2,89	3,01	104,15	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
berbasis potensi SDA						
Sasaran 16 : Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	3,02	2,72	90,06	Tinggi
Sasaran 17 : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,83	3,30	61,34	Rendah

Catatan :

- ** = Data Tahun 2024
- * = Data Sementara
- … = Data tidak tersedia
- ( ) = Minus

A.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir dalam rencana pembangunan jangka menengah dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD (2030)	Realisasi	Capaian 2025 terhadap Target (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	90,00	87,3	97,00
Sasaran 2 : Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,43	…	…
Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Crime Rate	Per 100.000 Pddk	70,00	188,69	(69,55)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD (2030)	Realisasi	Capaian 2025 terhadap Target (%)
Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton	Nilai SAKIP Kabupaten Buton	Poin	80,52	63,73	79,14
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	78,70	22,66	28,79
Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	78,62	77,65**	98,76
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas keluarga yang Sejahtera dan sesuai norma kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	67,5	64,2	95,11
Sasaran 8 : Meningkatnya	Indeks Ketimpangan	Poin	0,407	0,518**	72,72

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD (2030)	Realisasi	Capaian 2025 terhadap Target (%)
kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan	Gender				
Sasaran 9 : Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	11,08	13,46	78,51
	Rasio Gini	Poin	0,307	0,35	85,99
Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	84,65	85,46	100,95
Sasaran 11 : Meningkatnya ketangguhandantanggap bencanawilayah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,57	0,40*	70,17
Sasaran 12 : Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar(Infrastruktu	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	%	66,27	68,67	103,62

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD (2030)	Realisasi	Capaian 2025 terhadap Target (%)
r Dasar) berkualitas					
Sasaran 13 : Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana Pembangunan di seluruh wilayah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	80,72	79,67	98,69
Sasaran 14 : Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.	4.251,07	3,788,50	89,11
	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	%	22,34	22,13	99,05
	Indeks Ekonomi Biru	Poin	59,43	…	-
Sasaran 15 : Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	3,68	3,01	81,79
Sasaran 16 : Meningkatnya daya saing ekonomi	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	3,41	2,72	79,76

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD (2030)	Realisasi	Capaian 2025 terhadap Target (%)
daerah berbasis potensi unggulan daerah					
Sasaran 17 : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,32	3,30	57,75

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

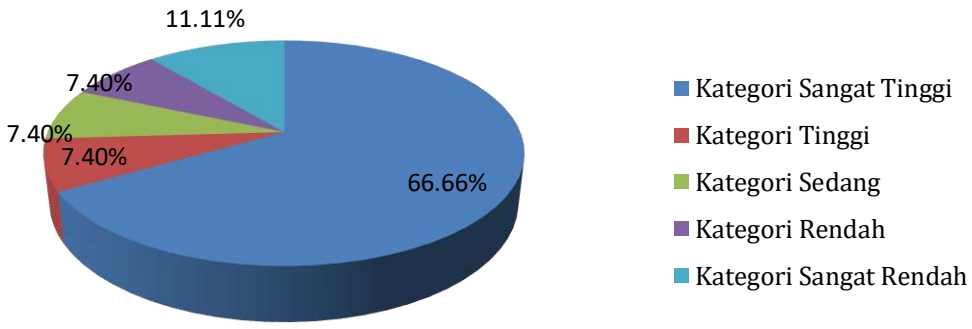
Evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran/program dimaksudkan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan sasaran/program yang ditetapkan dan menilai kemajuan pencapaian sasaran/program yang ditetapkan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Sedangkan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih difokuskan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam mencapai sasaran/program.

B.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 (RPD 2023-2026)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama Bupati tahun 2025, disimpulkan bahwa terdapat 18 (Delapan Belas) capaian indikator sasaran atau sebanyak 66,66% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, 2 (Dua) Indikator sasaran atau sebesar 7,40% masuk dalam kategori tinggi, 2 (dua) Indikator sasaran atau sebesar 7,40% masuk dalam kategori sedang, namun ada 2 (dua)

indikator sasaran atau 7,40% yang masuk dalam kategori rendah, bahkan ada 3 (tiga) indikator sasaran atau 11,11% masuk kriteria sangat rendah yaitu Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian dan Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan, serta Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional. Berikut Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Buton Tahun 2025 :

Grafik 3. 1 Capaian IKU Bupati Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Selanjutnya untuk evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja akan disajikan per-sasaran dengan uraian sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal

Wilayah Kabupaten Buton mempunyai kekayaan dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal. Untuk mengukur sejauh mana peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi lokal maka digunakan indikator dengan target dan realisasi serta capaian seperti pada tabel di bawah ini:

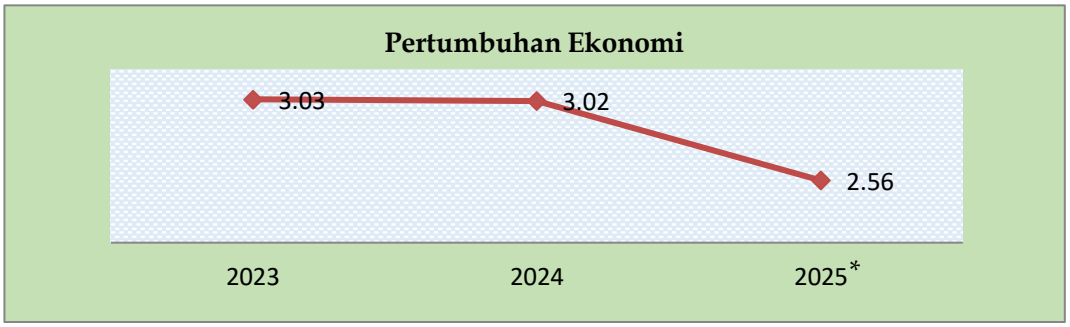
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Petumbuhan Potensi Ekonomi Lokal

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	4,37	2,58	59,03
2	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian	%	3,31	(3,70)	(111,78)
3	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda motor	%	8,51	11,39	133,84
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**27,03 (Sangat rendah)**

Sumber : BPS Kabupaten Buton Tahun 2026, Data diolah

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton beberapa tahun terakhir Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,74 persen, menandakan pemulihan yang cukup kuat. Namun, pada tahun 2023 terjadi perlambatan dengan angka pertumbuhan turun menjadi 3,03 persen. Meski demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,20 persen, hanya saja kembali terjadi Pelambatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan terjadi triwulan II 2025 sebesar 2,56% (angka sementara), tertinggal dari angka nasional yang mencapai 5,12%. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 3. 2 Trend Pertumbuhan Ekonomi Di kabupaten Buton 2023-2025



Sumber : BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka 2026

Ket : (*) = Angka sementara

Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton sangat dipengaruhi oleh capaian tiga sektor pendukung yaitu :

- **Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan** Kabupaten Buton pada tahun 2025 capaian kinerjanya sebenarnya 59,03%. Capaian ini diperoleh dari realisasi Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,58 dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 4,37. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024, realisasi target pada tahun 2025 mengalami penurunan, dimana tahun 2023 realisasi mencapai 3,60 dan tahun 2024 sebesar 2,83, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 2,58. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor dalam menghitung PDRB yakni PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut

dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor). Pada sektor pertanian, produktivitas sektor pertanian pada dasarnya menujukkan agregat yang cukup bagus, namun produk-produk hasil pertanian sebagian besar dijual dengan hasil mentah, sehingga kurang memberikan nilai tambah ekonomi pada produkproduk pertanian dalam arti luas. Sektor Perikanan pada wilayah Kabupaten Buton terfokus pada pengembangan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya, namun pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Buton masih sangat rendah. Selain itu belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendukung aktifitas pertanian dan perikanan serta peningkatan kapasitas petani dan nelayan yang belum optimal, maka dalam mengembangkan produk-produk pertanian dalam arti luas menjadi sedikit terhambat. Hal ini harus segera ditindaklanjuti selain akan berdampak pada produktivitas, juga akan berdampak pada kesejahteraan para petani dan pekebun. Dengan adanya permasalahan tersebut maka hal ini juga akan mengakibatkan kurang optimalnya pengembangan potensi sektor pertanian dalam arti luas, sehingga potensi-potensi produk pertanian dalam arti luas ini hanya akan bernilai harga jual mentah saja, berbeda jika dengan melakukan pengembangan produk-produk pertanian dalam arti luas menjadi produk yang setengah jadi atau langsung produk langsung konsumsi, sehingga dengan demikian produk-produk ini akan bernilai ekonomi tinggi. Dengan produk-produk yang berinovasi tinggi maka nilai produk akan meningkat, yang diharapkan akan memberikan dampak juga terhadap kesejahteraan para petani dan nelayan. Dengan sejahteranya para petani dan nelayan, maka para petani dan nelayan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk produktivitas produk-produk pertanian dalam arti luas.

- **Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian** juga memberikan kontribusi dalam Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Buton.

Capaian kinerjanya pada tahun 2025 nihil (111,78)%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar -3,70 dibagi dengan target sebesar 3,31. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi target pada tahun 2025 sedikit mengalami peningkatan meskipun masih pada kategori Nihil/minus, pada tahun 2024 realisasi menjadi -5,73 sementara di tahun 2025 meningkat menjadi -3,70. Kebijakan Potensi Sumber daya Alam yaitu Aspal belum mampu memberikan kontribusi dalam menopang perekonomian di daerah. Aspal Merupakan salah Satu Potensi Besar di Kabupaten Buton dan potensi ini tdak dimiliki di daerah Lain selain Dipulau Buton dan salah satu Negara di Trinidad. Kebijakan Aspal Buton secara nasional juga telah dilakukan dengan penguatan regulasi mendukung Penggunaan Aspal Buton khususnya bagi Penggunaan Jalan Propinsi, kabupaten/Kota bahkan jalan Nasional. Hal ini dapat dilihat Kontribusi PDRB kabupaten Buton Tahun 2022 mecapai 5,07 % namun mengalami penurunan di Tahun 2023 sebesar 2,57 %. Diharapkan Penggunaan Aspal Buton untuk kebutuhan Jalan Nasioanal, Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberi Kontribusi bukan Hanya di Kabupaten Buton akan tetapi dapat memberikan Kontribusi Devisa Negara oleh karena itu Sektor Pertambangan khususnya Aspal diharapkan Negara membentuk Kawasan Industri sehingga pengelolaan Aspal Buton dapat lebih Terpusat dan Efektif mengingat Potensi ini tidak dimiliki di daerah Bahkan Negara Lain dengan Deposit Perkiraan sebesar 660.000.000 Juta Ton.

- **Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor** mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2025. Capain kinerja sektor ini sebesar 133,84%, yang diperoleh dari realisasi Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,39 dibanding dengan target sebesar 8,51, sementara pada tahun 2024 sektor ini berada pada angka 6,86, sehingga dapat disimpulkan peningkatan sektor ini cukup signifikan. Peningkatan laju

pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli konsumen, suplai barang domestik yang tinggi, serta infrastruktur logistik yang memadai. Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya penjualan kendaraan, aktivitas eceran yang masif, dan kebutuhan jasa perawatan.

2) Sasaran 2 : Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan

Peningkatan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan menjadi langkah yang tepat mengingat komoditas unggulan yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan maksimal, sehingga pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan Kabupaten Buton. Dengan demikian pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan seimbang, tanpa merugikan ekosistem lingkungan sekitar**.** Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana Pencapaian kinerja sasaran maka digunakan indikator dengan target dan realisasi serta capaian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja SasaranTerkelolanya SDA Berwawasaan Lingkungan

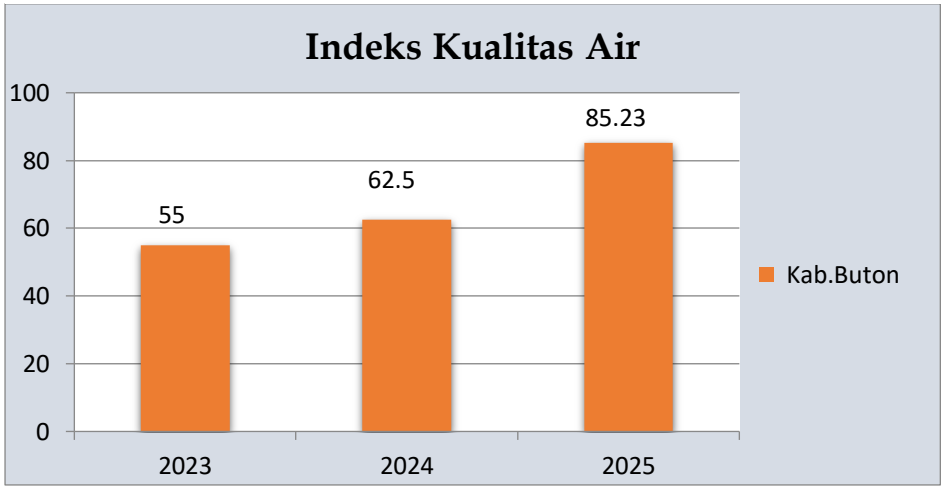
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Air	Nilai	78,05	85,23	109,19
2	Indeks Kualitas Udara	Nilai	87,51	85,22	97,38
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	86,78	86,27	99,41
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**101,99 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2026

- **Indeks Kualitas Air (IKA)** merupakan ”manajemen tool” tidak dapat dijadikan pengganti satus mutu air, istilah khusunya menilai kualitas air dengan merujuk kepada baku mutu khusus yang ditetapkan untuk peruntukan tertentu yang digunakan dalam penetapan status mutu air. Rumusan indeks kualitas air digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang komplek dalam satu infromasi yang mudah dipahami dan berguna untuk pengambilan kebijkan dalam analisis lingkungan. Indeks kualitas air juga digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengendalian pencemaran air, membantu perumusan kebijakan, membantu dalam mendisain program kulitas air dan mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi kualitas air. Indeks kualitas air menggunakan perhitungan Indeks pencemaran, di mana selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 IKA Kab.Buton berada diangka 55, sementara di tahun 2024 sebesar 62,5 dan pada tahun 2025 IKA Kab.Buton meningkat sangat signifikan mencapai nilai 85,23. Nilai IKA untuk tahun 2023 dan 2024 masih di hitung berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No, 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk hasil IKA tahun 2025 dihitung berdasarkan pada Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Meningkatnya Indeks Kualitas Air Kabupaten Buton yang mencapai nilai 85,23 didukung oleh beberapa faktor diantaranya pada pemantauan kualitas air sungai dillakukan 2x dalam setahun untuk mewakili musim kemarau dan musim hujan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 dan 2024 hanya dilakukan satu kali saja. Selain itu ada perubahan metode perhitungan yang pada awalnya masih merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup, Pada tahun 2025 metode perhitungan yang digunakan merujuk pada Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Untuk meningkatkan Indeks Kualutas air maka dilakukan upaya-upaya diantaranya restorasi Sungai di delapan sampel Sungai yang menjadi prioritas pemantauan dari segi perencanaan dan penganggaran.

Grafik 3. 3 Trend Pertumbuhan Ekonomi Di kabupaten Buton 2023-2025



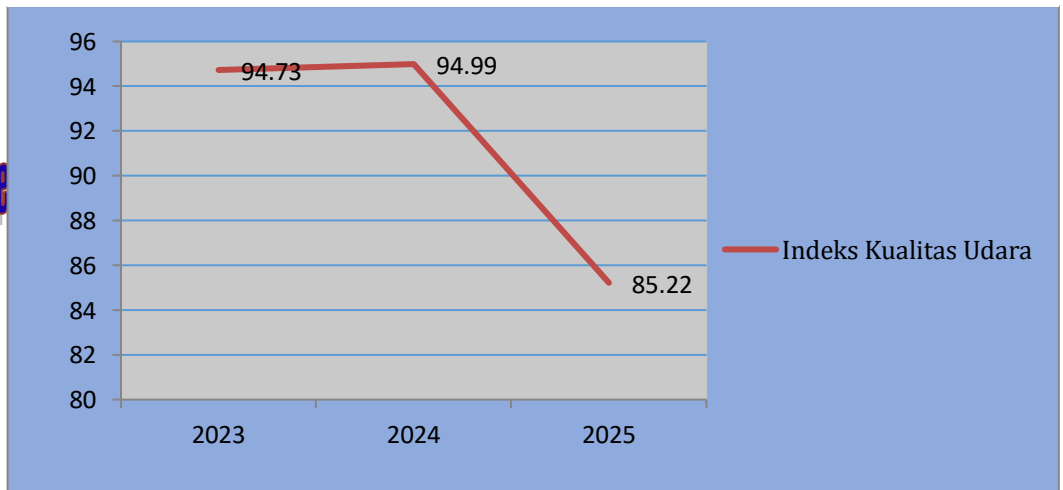
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buton Tahun 2026

- **Indeks Kualitas Udara** merupakan alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualtas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara. Yang di maksud dengan udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan berpengaruh pada kesehatan mahkluk hidup, termasuk manusia, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Tujuannya agar memberikan kemudahan dari keseragaman infromasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagian bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran

udara, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indeks kualitas udara di Kabupaten Buton pada tahun 2025 mengalami penurunan yakni 85,22, dibandingkanpada tahun 2024 indeks kualitas udara Kabupaten Buton mencapai 94,99 dari angka 94,73 di Tahun 2023.

Nilai IKU diperoleh dari Hasil Uji Laboratorrium atas dua Parameter NO2 dan SO2. Kemudian untuk hasil IKU tahun 2023 dan 2024 masih di hitung berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No, 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk hasil IKU tahun 2025 dihitung berdasarkan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Penurunan Indeks Kualitas Udara dipengaruhi oleh Nilai IKU diperoleh dari Hasil Uji Laboratorrium atas dua Parameter NO2 dan SO2. Kemudian untuk hasil IKU tahun 2023 dan 2024 masih di hitung berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No, 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk hasil IKU tahun 2025 dihitung berdasarkan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup.

Grafik 3. 4 Trend Indeks Kualitas Udara Kabupaten Buton



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buton Tahun 2026

- **Indeks Kualitas Tutupan Lahan** didefinisikan suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. Indeks kualitas tutupan lahan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa fakror seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degrasi lahan. Indeks kualitas tutupan lahan di kabupaten buton selama kurun waktu 3 (tahun) terakhir cukup fluktuatif, dimana tahun 2023 IKTL Kab.Buton berada pada angka 82,13 selanjutnya pada tahun 2024 turun menjadi 81,89, dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada angka 86,27.

  Nilai IKL untuk tahun 2023 dan 2024 masih di hitung berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No, 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk hasil IKL tahun 2025 dihitung berdasarkan pada Lampiran VII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Adapun data dasar msih merujuk pada data citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup karena data dasar RTH dan Data Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang merupakan kewenangan Kabupaten belum ada. Meningkatnya capaian ini dipengaruhi oleh pemantauan secara terus menurus di wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi perhitungan indeks. Guna meningkatkan capaian Indeks kualitas tutupan lahan maka dilakukan upaya-upaya

diantaranya menambah titip pengimputan luas tutupan lahan seperti RTH dan tutupan vegetasi lainya di aplikasi IKLH.

3) Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan

- Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Di samping terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, maka digunakan indikator-indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,90	13,97	100,50
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,99	8,69	96,66
3	Angka harapan hidup	Tahun	68,76	70,66	102,76
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**99,97 (sangat Berhasil)**

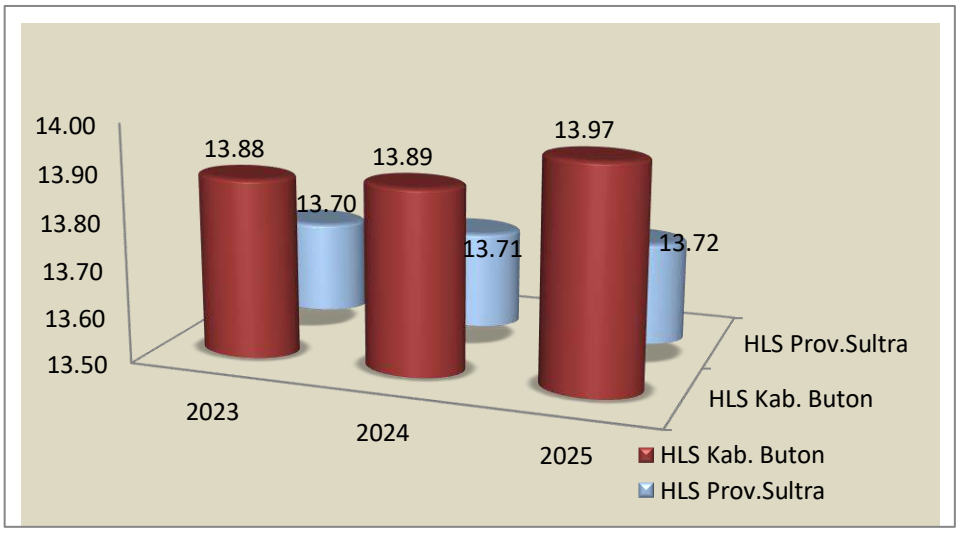
Sumber : BPS dan OPD Kab.Buton Tahun 2026

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja rata-rata sasaran strategis sebesar 99,97% atau Kategori Sangat Berhasil dengan jumlah indikator sebanyak 3 buah yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Harapan Hidup.

- **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)** didefinisikan sebagai Lamanya Sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

  Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun dengan angka yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2023 angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton sebesar 13,88, kemudian di tahun 2024 meningkat menjadi 13,89 dan di tahun 2025 kembali meningkat di angka 13,97. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2025 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,97 tahun atau setara dengan Diploma II. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton sedikit lebih tinggi dimana untuk Provinsi Sultra HLS berada di angka 13,72 pada tahun 2025. Meningkatnya akses pendidikan, bantuan pemerintah, kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi, serta kualitas sarana pendidikan menjadi faktor utama yang mendukung naiknya angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buton. Kedepannya Angka Harapan Lama Sekolah diharapkan lebih meningkat lagi melalui perluasan akses pendidikan, bantuan biaya, peningkatan kualitas guru dan sekolah, pencegahan putus sekolah, serta dukungan kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Berikut Trend Harapan Lama Sekolah Kab. Buton selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun jika disandingkan dengan HLS Prov.Sultra :

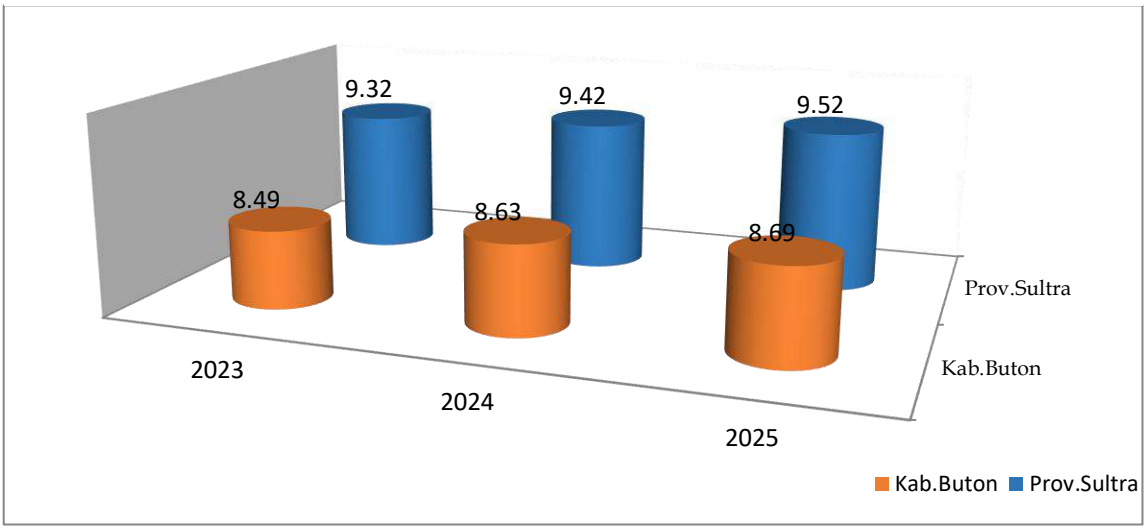
Grafik 3. 5 Trend Indeks Kualitas Udara Kabupaten Buton



Sumber data : https://sultra.bps.go.id, 2026

- **Rata-rata lama sekolah**, capaian kinerjanya sebesar 96,66%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 8,69 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 8,99. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,69 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun dengan angka yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2023 angka rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buton sebesar 8,49, kemudian di tahun 2024 meningkat menjadi 8,63 dan di tahun 2025 kembali meningkat di angka 8,69. Namun demikin rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buton masih di bawah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana rata-rata Lama Sekolah Prov.Sultra pada tahun 2025 mencapai 9,56. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berikut Trend Rata-rata Lama Sekolah Kab. Buton selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun jika disandingkan dengan Rata-Rata Lama Sekolah Prov.Sultra:

Grafik 3. 6 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Lama Sekolah Kab. Buton terhadap Prov.Sultra Tahun 2023-2025



Sumber data : https://sultra.bps.go.id, 2026

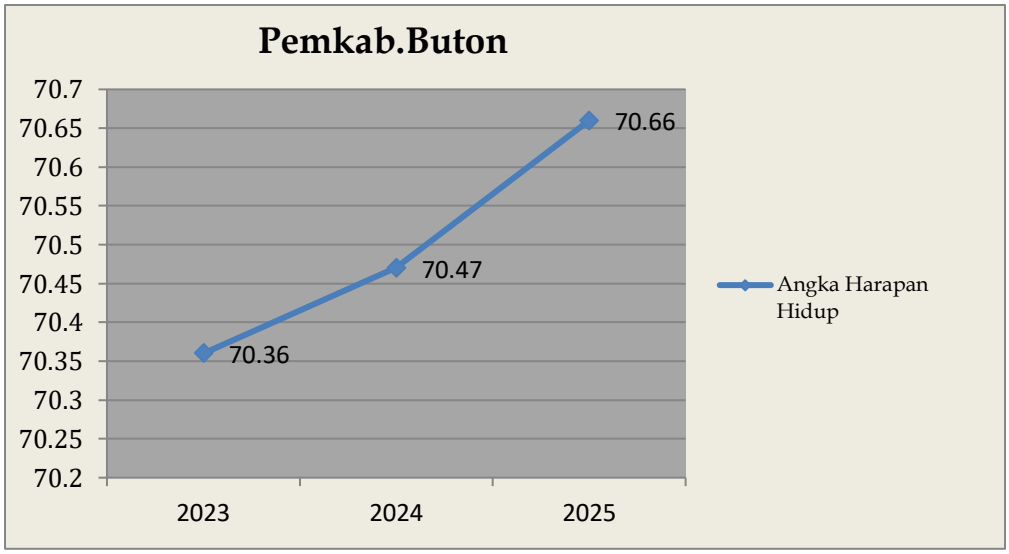
Meningkatnya angka Rata-rata lama sekolah (RLS) dipengaruhi oleh adanya Peningkatan akses pendidikan, bantuan pemerintah, kondisi ekonomi masyarakat, kesadaran pendidikan, serta fasilitas sekolah menjadi faktor utama yang mendukung naiknya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buton.

- **Angka Harapan Hidup**, didefisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

  Angka harapan hidup di Kabupaten Buton kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan trend positif dimana pada tahun 2023 Angka Harapan Hidup Kab.Buton berada pada angka 70,36, kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 70,47 dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 70,66. Peningkatan UHH ini sebagai dampak makin membaiknya pelayanan

kesehatan masyarakat terutama untuk pelayanan SPM yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Berikut Trend Angka Harapan Hidup Kab. Buton selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir:

Grafik 3. 7 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Lama Sekolah Kab. Buton terhadap Prov.Sultra Tahun 2023-2025



Sumber data : https://sultra.bps.go.id, 2026

Meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Buton didukung oleh adanya intervensi kebijakan oleh Pemerintah diantaranya:

1. Screening Hipotiroid kongenital dalam upaya untuk mengetahui potensi kelainan hipotiroid yang bisa menyebabkan kecacatan fisik dan intelektual pada anak di kemudian hari.
2. Screening Penyakit Jantung Bawaan (PJB) pada bayi baru lahir
3. Screening Triple Eliminasi (HIV,Sifilis dan HIV) pada ibu hamil serta kunjungan rumah pada ibu hamil dalam ibu nifas.
4. Serta distribusi USG ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan guna screening dini pada ibu hamil dalam upaya penurunan masalah kehamilan dan bayi.

4) Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dari amanah tersebut sudah tertuang pada dokumen RPD Kabupaten Buton, tertuang pada Misi kedua "Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas" dengan tujuan Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan sasaran Menurunnya angka kemiskinan daerah maka ditetapkan indikator beserta target dan realisasi serta capaian berikut :

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah

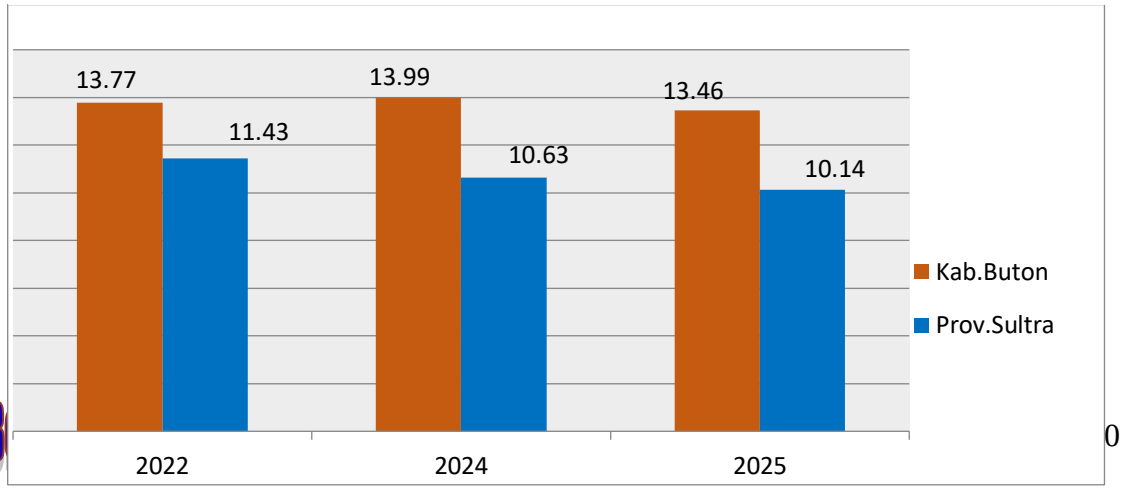
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Angka kemiskinan	%	13,04	13,46	103,22
2	Pendapatan perkapita	Juta rupiah	46,40	43,41**	93,55
3	Pengeluaran Perkapita	Ribu rupiah	7.885	8.607	109,15
4	Gini ratio	Nilai	0,312	0,350	87,82
5	Tingkat Penggangguran Terbuka	%	2,38	3,30	61,34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**91,01 (Sangat Berhasil)**

Sumber data: BPS Kab.Buton, 2026

- **Angka Kemiskinan,** untuk mengukur tingkat kemiskinan Badan Pusat Statitik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Buton cukup fluktuatif selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dimana Tahun 2023 tingkat kemiskinan berada diangka 13,77%, kemudian di tahun 2024 naik menjadi 13,99% namun pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan pada angka 13,46. Namun angka ini masih jauh di atas angka Kemiskinan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana pada tahun 2025 mencapai angka 10,14% pada September 2025. Pemerintah Kab.Buton melakukan percepatan penghapusan kemiskinan secara tepat sasaran melaui strategi kebijakan yang meliputi Upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, serta pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi. Dengan Program kegiatan yang saling terintegrasi akan mampu memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buton. Berikut Perbandingan Angka Kemiskinan Kab. Buton Terhadap Angka Kemiskinan Prov.Sultra selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir:

Grafik 3. 8 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kab. Buton Terhadap Tingkat Kemiskinan Prov.Sultra Tahun 2023-2025



Sumber data : https://sultra.bps.go.id,2026 dan BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka 2026

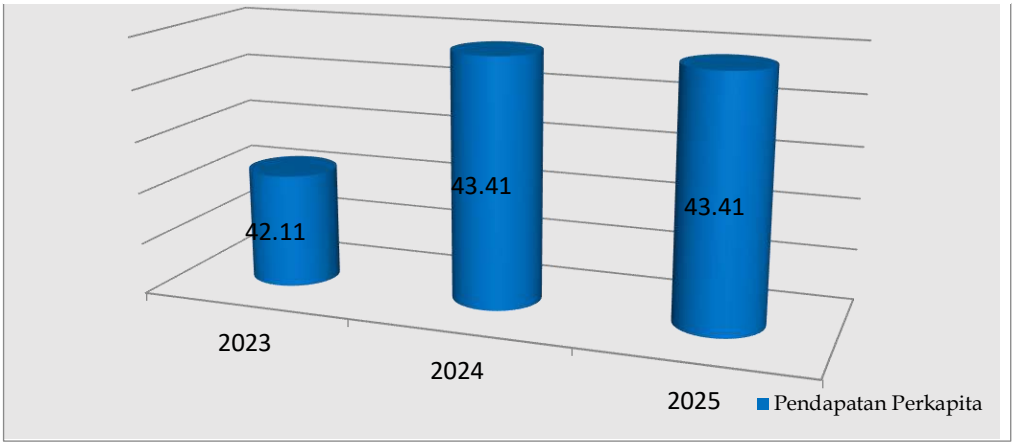
Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kabupaten Buton telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMAS, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya.

- **Pendapatan Perkapita,** PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut.Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

  Capaian kinerja **pendapatan perkapita** Kabupaten Buton dalam kurun waktu 3 tahun (2023-2025) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 pendapatan perkapita Kab.Buton berada pada angka 42,11, kemudian di tahun 2024 meningkat sebesar 43,41, selanjutnya pada tahun 2025 pendapatan kabupaten buton masih berada di angka 43,41, sebab angka pendapatan perkapita Kabupaten Buton untuk tahun 2025 hingga saat ini belum dirilis atau data belum tersedia. Diharapkan pendapatan perkapita ini kan terus membaik

mengingat trand sudah mulai memberikan kenaikan yang positif. Perkembangan Trend Pendapatan Perkapita dapat dilihat pada Grafik Berikut :

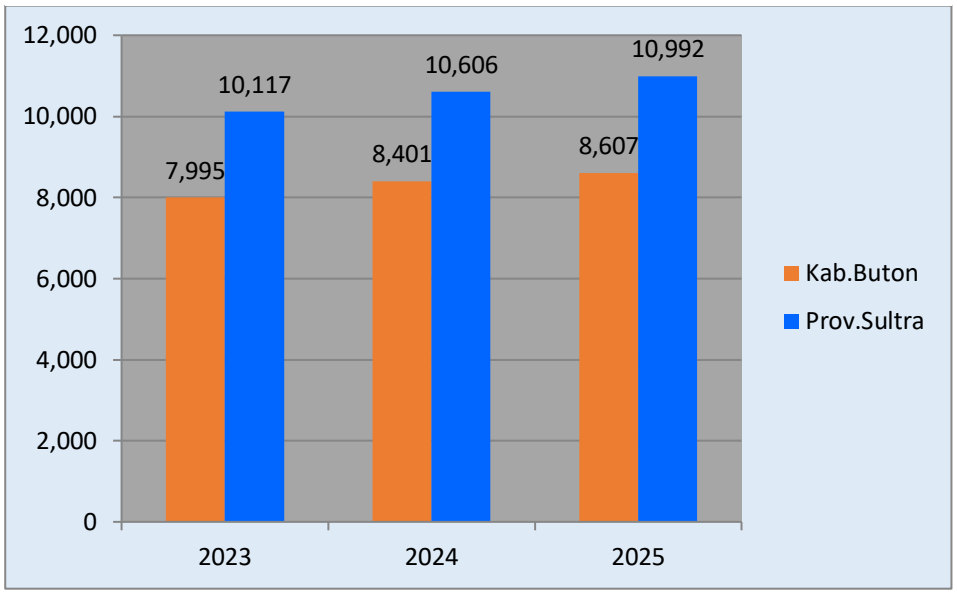
Grafik 3. 9 Trend Pendapatan Perkapita di Kabupaten Buton Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka Tahun 2026

- **Pengeluaran Perkapita,** adalah biaya dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga. Kinerja pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Buton, terjadi tren kenaikan moderat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Tingkat konsumsi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka pengeluaran perkapita penduduk tahun 2023 sebesar Rp. 7.995 ribu rupiah, pada tahun 2024 meningkat menjadi 8.401 ribu rupiah dan kembali meningkat pada tahun 2025 yang mencapai 8.607 ribu rupiah. Namun demikian pengeluaran perkapita kabupaten Buton masih jauh di bawah Provinsi Sulawei Tenggara yang mencapai 10.992 ribu rupiah di tahun 2025. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Grafik 3. 10 Perbandingan Pengeluaran Perkapita di Kab. Buton Terhadap Pengeluaran Perkapita Prov.Sultra Tahun 2023-2025



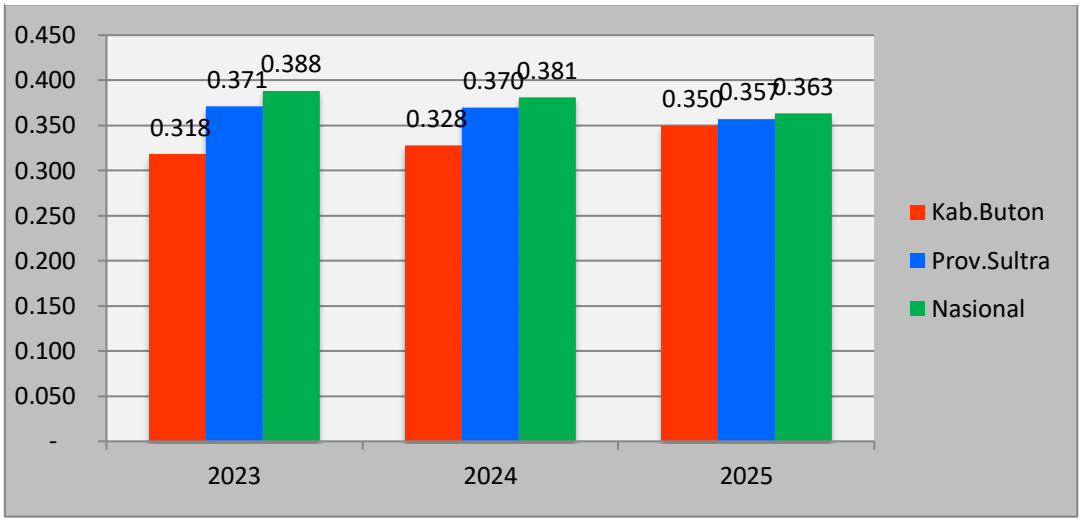
Sumber data : https://sultra.bps.go.id,20256

- **Gini Ratio** merupakan gambaran pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Ketimpangan ekonomi ataupun distribusi pendapatan yang diukur dengan gini ratio ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang bersikar dari 0 (0%) sampai 1 (100%). Nilai 0 menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna sedangkan nilai 1 menggambarkan ketidaksempurnaan. Artinya bila sebuah Negara mempunyai gini ratio bernilai 0 maka distribusi pendapatan penduduk yang ada dalam Negara tersebut.

  Perkembangan indeks Gini Ratio Kabupaten Buton kurun waktu 3 tahun (2023-2025) cukup fluktatif atau turun naik dari tahun ketahun. Pada tahun 203 Gini Ratio Kabupaten Buton berada pada angka 0,318, kemudian pada tahun 2024 naik menjadi 0,328, dan terakhir di tahun 2025 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,350. kenaikkan gini ratio ini disebabkan oleh pertumbuhan pengeluaran masyarakat kelompok atas yang lebih pesat dibanding pertumbuhan pengeluaran kelompok lain. Namun keadaan ini masih sedikit

dibawah rata-rata gini ratio Sulawesi tenggara dan Nasional. Rata-rata gini ratio Kabupaten Buton sebesar 0,350 sedangkan rata-rata gini ratio provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional masing- masing sebesar 0,357 dan 0,363.

Grafik 3. 11 Gini Ratio Nasional, Prov Sultra, Kabupaten Buton Tahun 2023-2025



Sumber data : https://sultra.bps.go.id,20256

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**, Angkatan kerja yang bertambah harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerjadalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Dalam lingkup Kabupaten Buton, TPT dalam kurun waktu 3 tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2023 TPT kabupaten Buton menurun dari Tahun 2022 yakni dari 2,99 turun menjadi 2,48 di tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2,95, dan pada tahun 2025 kembali meningkat diangka 3,30 . Meningkatknya angka TPT di Kabupaten Buton Disebabkan oleh beberapa Faktor diantaranya:

1) Banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Buton
2) Tidak seimbangnya kesempatan kerja dan lowongan pekerjaan perusahaan yang tersedia di Kabupaten Buton berdasarkan belum adanya laporan perusahaan mengenai informasi lowongan kerja tersedia pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, dan
3) Keterbatasan informasi akurat jumlah tenaga kerja yang bekeja di Kabupaten Buton, di bandingkan dengan total angkatan kerja dari BPS.

Untuk menurunkan TPT di Kabupaten Buton, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya:

1) Pelatihan Berbasis Kompetensi

   Untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar pasar kerja. Program pelatihan diarahkan pada sektor unggulan daerah sehingga lulusan memiliki peluang kerja lebih besar.
2) Pengembangan Program Kewirausahaan

   Selain penempatan kerja formal dan pelatihan kerja berbasis kompetensi, dinas tenaga kerja melaksanakan program pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan kewirausahaan usaha mandiri dan pendampingan usaha bagi kelompok-kelompok industri tertentu. Program ini bertujuan menciptakan wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja tambahan.

3) Pelaksanaan Program Padat Karya

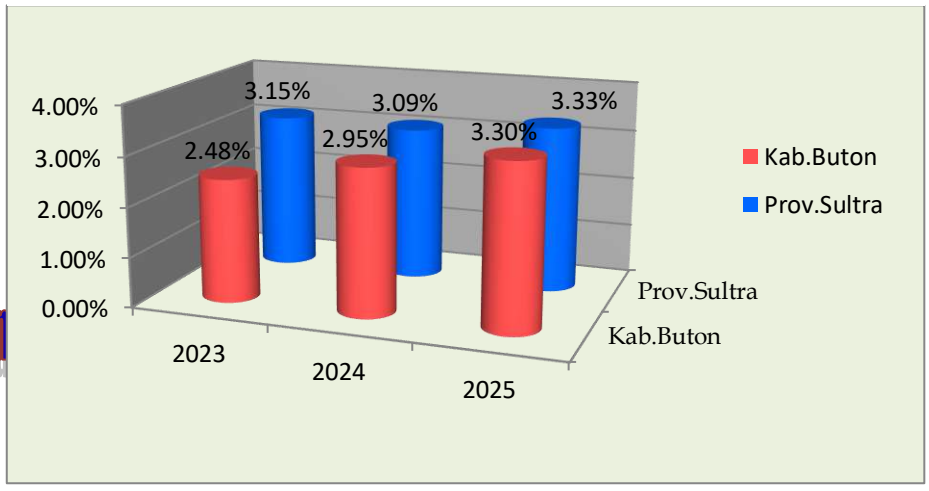
Program padat karya dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menyerap tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau terdampak kondisi ekonomi. Selain memberikan penghasilan sementara, program ini juga meningkatkan daya beli masyarakat.

4) Sinergi Lintas Sektor

Penanganan pengangguran memerlukan kolaborasi dengan OPD lain, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta pemerintah desa/kelurahan. Sinergi ini penting untuk memastikan program pengurangan pengangguran berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara umum TPT Kabupaten Buton sedikit lebih rendah jika dibandingkan TPT di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 3,33 pada November 2025. Berikut Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Buton Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Prov.Sultra selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir:

Grafik 3. 12 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab.Buton



Sumber data : https://sultra.bps.go.id,2026 dan BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka 2026

5) Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga

Untuk membangun sumber daya manusia yang merata dan berkualitas, dibutuhkan adanya partisipasi gender dalam pembangunan. Dengan adanya partisipasi gender ini diharapkan pembangunan akan berjalan dengan lebih baik. Partisipasi gender ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama antara kaum perempuan dan laki-laki untuk melakukan hal-hal yang produktif. Selain pemberdayaan gender juga diperlukan pemberdayaan pemuda dan olahraga yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan SDM yang berkualitas, berkompeten dan profesional, peduli dan tanggap terhadap tuntutan inspirasi, partisipasi serta memiliki ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar, serta berbagai perilaku yang positif. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga, ditetapkan indikator sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, pemuda dan olahraga

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Kategori kabupaten layak anak	Nilai	750,00	566,66	75,54

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
2	Indeks pembangunan gender	%	83,29	82,07	98,53
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	99,01	6,24	6,30
4	Persentase cabang olaraga yang terseleksi mengikuti event olaraga daerah, regional dan nasional	%	100	14,71	14,71
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**48,77 (Tidak Berhasil)**

Sumber : OPD Kab.Buton Tahun 2026

- **Kategori kabupaten layak anak**, merupakan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Pada Tahun 2025 Kabupaten Buton mendapatkan nilai 566,56 dari target sebesar 750,00, sehingga diperoleh capaian 75,54. Nilai tersebut meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan perolehan nilai Tahun sebelumnya sebesar 435,62. Meningkatnya Nilai Kabupaten Layak anak menjadikan Kabupaten Buton Masuk dalam Kategori Pratama, dimana dalam hasil penilaian Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) terdiri dari 5 tingkat, yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama, Kabupaten/Kota Layak Anak.

  Penilaian KLA dilakukan berdasarkan 24 indikator yang terbagi dalam 5 klaster. Ke-5 klaster tersebut adalah, Klaster hak sipil dan kebebasan, Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, Klaster Perlindungan Khusus Anak. Meningkatnya Nilai Kabupaten

Layak anak untuk Kabupaten Buton didukung oleh tersedianya beberapa dokumen pendukung yang menjadi indikator penilaian, yaitu:

1. SK Sekolah Rama Anak tingkat SMA di Kecamatan pasarwajo, Kecamatan wabula dan kecamatan Wolowa, Tingkat SMP dan SD di kecamatan Pasarwajo, Wolowa, Siontapina.
2. SK Puskesamas Rama Anak Dikecamatan Pasarwajo, Kecamatan Wabula dan Kecamatan Siotapina.
3. SK Forum Anak Kabupaten.
4. Sk Forum Anak Kecamatan
5. SK Forum Anak Desa/ Kelurahan,
6. SK Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

   MOU dengan pengadilan Agama Tentang layanan Konseling bagi Orang Tua dan Anak Pemohon Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan status kabupaten layak Anak melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat regulasi percepatan kabupaten layak anak.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, non pemerintah, media dan dunia usaha dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak guna tercapainya target kabupaten layak anak.
3. Mengoptimalkan kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing anggota.

Memfasilitasi forum anak kabupaten, kecamatan desa dan kelurahan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan hak-hak anak di Kabupaten Buton.

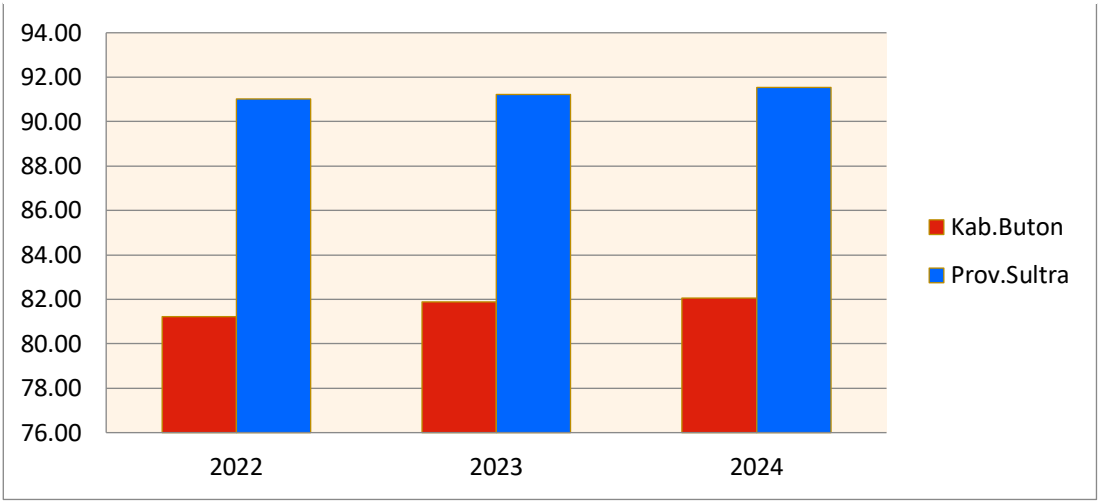
- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** Kabupaten Buton pada tahun 2025, capaian kinerjanya sebesar 98,53. Capaian tersebut diperoleh dari nilai Indeks Pembangunan Gender Kab.Buton sebesar 82,07 dibandingkan dengan target kinerja IPG sebesar 83,29. Namun nilai IPG yang sebeser 82,07 masih

merupakan nilai pada tahun 2024, sebab hasil penilaian IPG Tahun 2025 baru akan dirilis pada pertengahan tahun 2026.

Indeks Pembangunan Gender itu sendiri merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang responsif gender sesuai PERDA No 8 tahun 2008, telah menggarisbawahi bahwa salah satu trategi pembangunan Kabupaten Buton adalah pendekatan 'gender mainstreaming' atau pengarusutamaan gender (PUG) yaitu gambaran yang memperlihatkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Secara teknis, angka IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara lakilaki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Mengacu pada rumus baru perhitungan IPG, setiap tahunnya angka IPG Kabupaten Buton cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 IPG Kab. Buton berada diangka 81,21 dan mengalami kenaikan ditahun 2023 mencapai 81.88, dan pada tahun 2024 kembali meningkat di angka 82,07. Namun demikian angka ini masih berada jauh di bawah Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sultra yang berada di angka 91,53 pada tahun 2024. Berikut Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Buton terhadap Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

Grafik 3. 13 Trend Tingkat Tingkat IPG Kab. Buton Terhadap IPG Prov Sultra Tahun 2022-2024



Sumber Data : bps.go.id, 2026 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlidnungan Anak 2026

Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat regulasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah guna terlaksananya Pengarusutamaan Gender di daerah sehingga hasil pembangunan di Kabupaten Buton dapat dinikmati semua lapisan masyarakat baik laki-laki, perempuan, kaum disabilitas lansia maupun anak-anak.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, non pemerintah, media dan dunia usaha dan masyarakat tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang, sehingga pembangunan manusia laki-laki dan pembangunan perempuan mengalami peningkatan guna tercapainya kesetaran dan keadilan gender di Kabupaten Buton.
3. Mengoptimalkan kinerja POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah.

- **Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan** di Kabupaten Buton pada Tahun 2025 capaian kinerjanya sebesar 6,30%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 6,24% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 99,01%. Untuk Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial diperoleh melalui perbandingan antara jumlah pemuda (usia 16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Buton dengan jumlah keseluruhan pemuda (usia 16-30) di Kabupaten Buton, seperti yang tergambar pada rumus di bawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah pemuda (usia } 16-30 \text{ tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kab. Buton}}{\text{Jumlah keseluruhan pemuda (usia } 16-30) \text{ di Kab Buton}} \times 100\% \quad =$$

Keterangan :

- Yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
- Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.
- Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK.
- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

Jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2024, capaian tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2024 Persentase

partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan mencapai 10,71%. Penurunan ini disebakan oleh terjadinya pengurangan Jumlah Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Capaian partisipasi Pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan sangat ditentukan oleh wadah Organisasi pengembangan potensi pemuda. Factor yang mempengaruhi Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam wadah organisasi kepemudaan lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah anak usia muda hal ini disebabkan kurangnya partisipasi pemuda dalam organisasi salah satu faktornya adalah tidak adanya kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan maka Pemerintah akan melaksanakan kegiatan kepemudaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan serta pengembangan pemuda berwirasusaha, penguatan pemuda pelopor serta pemuda bela negara yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan sehingga akan meningkatkan partisipasi Pemuda dalam organisasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan organisasi.

- **Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional** untuk Kabupaten Buton pada tahun 2025 capaian kinerjanya sebesar 14,71%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 14,71% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah cabang olahraga 5 cabor (atletik, kempo, dayung, basket, futsal) yg ikut event di banding dengan 34 cabang olahraga yg dibina x 100% Pelaksanaan Event olahraga oleh daerah diagendakan melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang dilaksanakan 2 tahun sekali dan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) 4 tahun sekali menyebabkan minimnya pelaksanaan event per tahun serta terbatasnya kegiatan event regional dan kemampuan daya saing auntuk berkompetisi di

tingkat nasional menyebabkan faktor minimnya persentase cabor yang terseleksi untuk berkompetisi di event-event olahraga baik di tingkat regional maupun nasional.

Untuk meningkatkan capaian target kinerja maka yang dilaksanakan adalah melakukan intensitas event event olahraga di daerah baik sasaran pelajar maupun terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara konsisten sehingga akan mendorong atlit untuk berkompetisi dan mengembangkan kemampuan secara terukur.

6) Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab menjadi kunci tercapainya pemerintahan yang berkualitas. Pemerintahan yang bersih, baik dan berkualitas akan memberikan dampak pada pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka ditetapkan indikator kinerja beserta target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

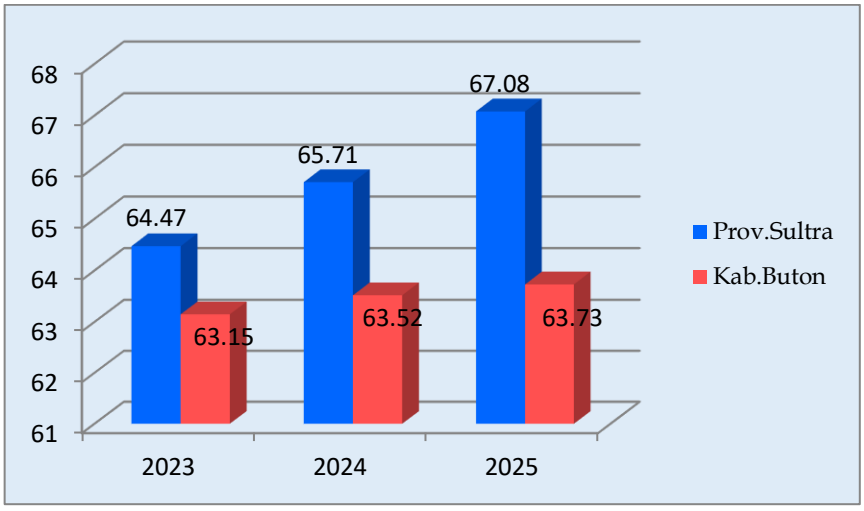
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Sakip Kabupaten	Nilai	62	63,73	102,79
2	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	100
3	Indeks kepuasan masyarakat	%	30	90,39	301,3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**168,03 (Sangat Berhasil)**

Sumber : OPD Kab.Buton Tahun 2026

- **Nilai Sakip Kabupaten Buton** pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 102,79%. Capaian ini diperoleh dari nilai hasil Sakip Kabupaten Buton sebesar 63,73 (B) dibandingkan dengan target kinerja sebesar 62 (B). Capaian kinerja nilai SAKIP menunjukkan kenaikan yang baik selama tahun 2023 – 2025, meskipun masih pada kategori yang sama namun nilai SAKIP pada tahun 2025 kembali meningkat dari capaian tahun 2024 yang hanya sebesar 63,52 dan nilai ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perolehan nilai Sakip Prov.Sultra sebesar 67,08 pada tahun 2025.

  Berbagai kebijakan peningkatan nilai SAKIP terus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan perencanaan dan efektifitas pemilihan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung kinerja sasaran strategis. Selain itu, berbagai kegiatan dan dokumen pendukung untuk meningkatkan kualitas SAKIP terus dilakukan diantaranya menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, melakukan review SOP, peningkatan kompetensi tim penyusun SAKIP perangkat daerah, dan menyusun Proses Bisnis Internal pemerintahan. Pemerintah daerah berharap dengan pembenahan hasil rekomendasi penilaian dari Tim Evaluasi Kemenpan RB dapat meningkaatakan nilai predikat di tahun berikutnya, dengan harapan kategori ini mendapat penghargaan atas penilaian kinerja Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Kemenpan RB Republik Indonesia sebagai lembaga yang menilai kinerja Pemerintah daerah. Berikut perbandingan nilai Sakip Kab.Buton terhadap Nilai Sakip Prov.Sultra kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 14 Perbandingan Nilai Sakip Kab.Buton Terhadap Nilai Sakip Prov.Sultra



Sumber : Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2025

- **Opini BPK,** pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Buton kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2024. Capaian ini terus konsisten sejak pertama kali mendapatkan WTP di tahun 2013. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah. Saat ini Kabupaten Buton berusaha untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan memberlakukan sistem transparansi anggaran serta berusaha menjaga kekonsisten terhadap perencanaan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPD 2023-2026). Dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD) diharapkan dapat ditingkatkan dengan berusaha mengefektifkan sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Buton. PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap APBD sehingga pendapatan daerah meningkat. Tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan akan bermuara kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga menimbulkan kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

- **Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)** Pemerintah Kabupaten Buton pada tahun 2025 capaian kinerjanya sebesar, capaian kinerjanya 301,3%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 90,39 (sangat baik) dibandingkan dengan target kinerja sebesar 30. Tingginya capaiannya ini disebabkan oleh rendahnya target kinerja yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan review/perbaikan terhadap target kinerja indikator sasaran. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Pemkab.Buton selama 3 (tiga) Tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2023 nilai IKM Pemkab.Buton berada pada angka 88,68, selanjutnya pada tahun 2024 IKM Pemkab.Buton meningkat cukup signifikan diangka 91,10, namun pada tahun 2025 Nilai IKM kembali turun diangka 90,39. Nilai IKM Pemkab.Buton diperoleh dari rekapitulasi nilai Survey Kepuasaan Masyarakat 8 (delapan) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kab.Buton, yakni Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Puskesmas Wakaokili, Puskesmas Pasarwajo, dan Kecamatan Pasarwajo.

  Berdasarkan hasil rekapitulasi Laporan SKM atas Pelayanan Publik Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton tersebut, selain terdapat Nilai Sangat Baik dan Baik, akan tetapi masih adanya nilai persepsi Kurang Baik, sebagian besar dikarenakan lemahnya pada unsur

"waktu pelayanan", "Sarana dan Prasarana", dan "Produk/spesifikasi Jenis pelayanan."

Terkait unsur "waktu pelayanan" dan "Produk/spesifikasi Jenis pelayanan" hal ini bisa dikarenakan:

- alur/mekanisme pelayanan yang "berlapis";
- petugas pelayanan itu sendiri yang terkesan lamban memberikan pelayanan;dan
- Kurangnya Sosialisasi tentang Produk/spesifikasi Jenis pelayanan.

Terkait dengan nilai yang masih kurang baik untuk unsur "Sarana dan Prasarana" :

- Gedung Unit Layanan yang sempit dan berbagi dengan unit kerja yang lain.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Bagi kelompok rentan/difabel.
- Kurangnya tempat bermain anak.
- Tempat duduk antrian yang masih kurang

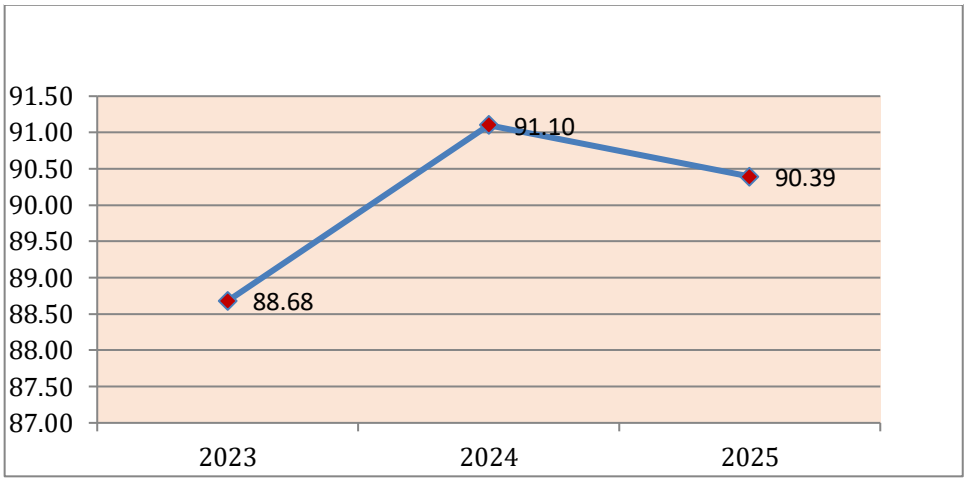
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten ini merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buton yang dapat menjadi referensi atau masukan bagi Unit Pelayanan dan pihak terkait dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik. . Pemerintah Kabupaten Buton senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat melalui Perangkat Daerah dan unit pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton melalui perbaikan kualitas pelayanan publik ke depan secara bertahap, antara lain:

1. Pencermatan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan rendah atau dibawah rata-rata, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi;
2. Terkait unsur "waktu pelayanan", akan dilakukan upaya:

- jika memungkinkan perlu adanya kebijakan "pemangkasan" mekanisme/alur pelayanan.
- diperlukan media yang lebih banyak dan tersebar guna memberikan informasi lengkap tentang pelayanan.

3. Pelatihan service excellent (pelayanan prima) diperuntukan bagi pelaksana layanan, guna mengoptimalkan sikap dan perilaku pelayanan, serta meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab pelaksana;
4. Mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan;
5. Terkait dengan "sarana dan prasarana":
   - jika sarana prasarana sudah cukup jumlahnya tetapi rusak (tidak layak), maka ada kemungkinan untuk diperbaiki/diganti;
   - jika sarana prasarana kurang cukup/kurang memadahi jumlahnya maka perlu ada langkah penambahan/pengadaan guna memenuhi kekurangannya.
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan.
7. Komitmen bersama yang kuat agar tidak ada lagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Grafik 3. 15 Trend Nilai SKM Kabupaten Buton Tahun 2023-2025



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab.Buton Tahun 2026

7) Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pemberian pelayanan kepada masyarakat juga hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dengan demikian, dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab tak terlepas dari optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Pemkab.Buton menetapkan indikator beserta target kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	85,54	68,76	80,38
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**80,38 (Berhasil)**

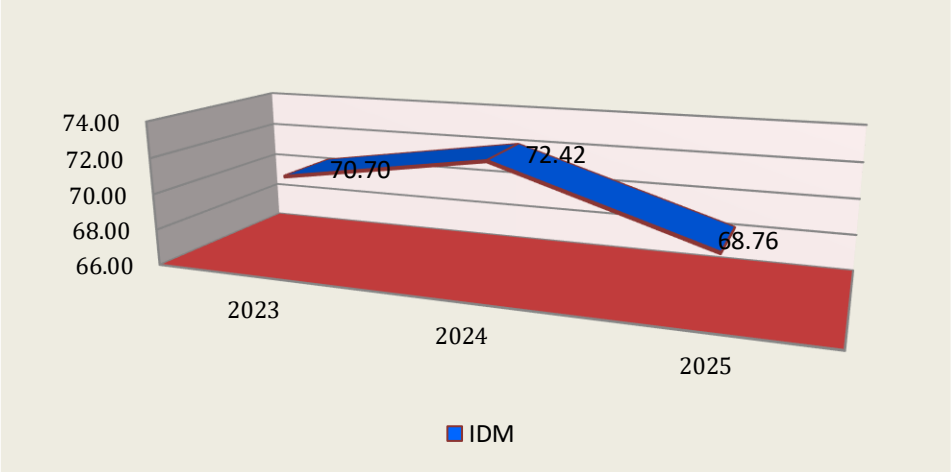
Sumber : DPM & Desa Kab.Buton Tahun 2026

- **Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)** Kabupaten Buton pada tahun 2025 capaian kinerjanya sebesar 80,38%. Capaian ini diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi sebesar 68,76 dengan target kinerja sebesar 85,54%. Nilai IDM diperoleh berdasarkan data hasil pengukuran nilai indeks desa yang dapat dilihat pada KepmenDesPDT 343 Tahun 2025 ttg Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2025. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, IDM Kab.Buton pada tahun 2025 turun cukup signifikan, dimana pada tahun 2024 IDM mencapai angka 72,42. Indeks desa membangun merupakan Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dinilai dan dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui E-Book IDM yang dikeluarkan setiap tahunnya.

  Penurunan status desa dari desa maju menjadi desa berkembang disebabkan menurunnya indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi,indeks ketahanan lingkungan menyebabkan penurunan capaian hasil nilai indeks desa kabupaten. Untuk meningkatkan capaian Indeks Desa Membangun, Pemkab.Buton melakukan berbagai upaya diantaranya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, Penguatan Ekonomi Desa, serta Peningkatan Infrastruktur

Desa. Berikut Trend IDM Kab.Buton selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir :

Grafik 3. 16 Trend Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Buton Tahun 2023-2025



Sumber : DPM & Desa Kabupaten Buton Tahun 2026

8) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal

Kabupaten Buton memiliki kekhasan dan keunikan yang menjadi potensi yang bernilai ekonomi tinggi dengan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan budaya lokal daerah. Melalui pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal akan mampu merangsang tumbuhnya sektor pariwisata pada Kabupaten Buton. Aneka aset budaya dapat dikembangkan dengan maksimal sehingga akan mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal memerlukan dukungan apresiasi masyarakat.

Guna mewujudkan masyarakat Buton yang menghargai nilainilai budaya dan bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal. Sementara untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator beserta targetnya sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya dan Kearifan Lokal

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase warisan budaya takbenda yang dilestarikan	%	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**100 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab.Buton Tahun 2026

- **Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan** pada tahun 2025 capaian kinerjanya sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% tersebut diperoleh dari jumlah warisan budaya takbenda (WBTB) yang dilestarikan sebanyak 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan WBTB dibandingkan dengan jumlah warisan budaya takbenda yang ada di Kabupaten Buton yang juga sebanyak 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan WBTB, dimana seluruh WBTB tersebut masih terus dilestarikan di semua desa yang berjumlah 83 Desa yang ada di Kabupaten Buton.

  Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda mendefinisikan warisan budaya takbenda sebagai praktik, representasi, ekspresi, serta pengetahuan dan keterampilan (termasuk instrumen, objek, artefak, ruang budaya), yang dikelompokkan, dikategorikan dalam beberapa kasus, individu mengakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka, Kadang-kadang disebut warisan budaya hidup, dan diwujudkan antara lain dalam domain berikut:

  - Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
  - Seni Drama; Praktik sosial, ritual dan acara meriah;
  - Pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta;

– Keahlian tradisional

Berdasarkan data dokumen Pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Buton tahun 2025 yang dirumuskan oleh Tim PPKD kab. Buton bahwa ada 317 WBTB yang termuat dalan 10 jenis OPK (obyek pemajuan kebudayaan) yaitu :

1. Manuskrip
2. Tradisi lisan (Pantun, Peribahasa, Teka-Teki)
3. Adat Istiadat
4. Ritus
5. Pengetahuan Tradisional (Kerajinan, Metode Penyehatan, Jamu Ramuan Tradisional, Makanan minuman)
6. Teknologi Tradisional (Alat Produksi, Senjata Tradisional)
7. Seni (Seni Tari, Seni Pertunjukan, Seni Musik, Seni Sastra, Lagu, Instrument Musik, Film, Seni Rupa)
8. Bahasa
9. Permainan Rakyat
10. Olahraga Tradisional

Namun dari seluruh jenis warisan budaya takbenda yang ada di kabupaten Buton, terdapat 3 (tiga) warisan budaya takbenda dari jenis ritus yaitu **Dole-Dole**, **Tandaki** dan yang terbaru di Tahun 2025 yaitu yang telah memperoleh sertifikat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sementara untuk jenis warisan budaya takbenda lainnya masih dalam proses pengajuan untuk mendapatkan sertifikat.

9) Sasaran 9: Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Keadaan ini diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Buton. Pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Untuk mengukur sejauhmana terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat, maka ditetapkan indikator beserta target kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kehidupan Sosial Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	53,25	73,59	138,19
Persentase ormas aktif	%	100	67,5	67,5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**102,84 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Polres Buton Tahun 2026 dan Badan Kesbangpol Kab.Buton 2026

- **Persentase penyelesaian tindak kejahatan** di Kabupaten Buton pada tahun 2025 capaian kinerjanya sebesar 138,19%.Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan realisasi penyelesaian kasus sebesar 73,59% dengan target kinerja sebesar tahun 2025 sebesar 53,25%. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Buton menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 231 jumlah perkara tindak pidana yang laporannya masuk ke Polres Buton dan dari 231 kasus tersebut yang

terselesaikan sebanyak 170 kasus. Dari 231 jumlah perkara tindak pidana yang ditangani Polres Buton didominasi oleh Kasus Penganiyaan sebanyak 72 kasus. Masih tingginya angka tindak kejahatan di Kabupaten Buton disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor Ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang menurun dibanding tahun lalu, serta kesenjangan ekonomi yang semakin lebar membawa dampak munculnya aksi nekat pencurian dan penipuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
2. Faktor Sosial, perkembangan tehnologi dan informasi saat ini membawa dampak sosial pada kehidupan masyarakat. Meningkatnya kasus narkoba, perubahan gaya hidup anak muda saat ini, jika tidak dapat dikontrol akan membawa ke arah pergaulan yang salah dan terjerat pada penggunaan narkoba maupun minuman keras. Kasus klitih merupakan salah satu kasus yang masuk dalam kategori penganiayaan.
3. Kurang maksimalnya sanksi hukum bagi pelaku kriminalitas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku
4. Khusus perkara gangguan Kamtibmas sebagian besar karena pengaruh minuman keras.

Solusi yang dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan diantaranya :

1. Memberdayakan dan meningkatkan peran anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan nendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus yang terjadi.
3. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa. Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Hukum dan Peraturan Daerah Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di

semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Hukum dan Peraturan Daerah.

Khusus untuk tindak kejahatan akibat konsumsi alcohol, Pemerintah Kabupaten Buton telah mengambil langkah langkah terkait hal tersebut dengan menginisiasi kampung bebas minuman beralkohol di tujuh desa yakni Wabula I, Wabula, Wasuemba, Holimombo, Koholimombono, Wasampela, dan desa Bajo Bahari Kecamatan Wabula Kabupaten Buton setelah pada tahun sebelumnya desa Dongkala dan Kondowa Kecamatan Pasarwajo juga telah mendekalarasikan sikap kampung bebas Miras. Keberadaan Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Buton cukup memprihatinkan, pasalnya daerah ini dikenal sebagai tempat produksi minuman beralkohol tradisonal dan tidak jarang dipasok hingga ke Kota dan Kabupaten terdekat. Kampung bebas miras tidak asal dibentuk, namun didalamnya terdapat sebuah kesepakatan oleh para tokoh adat dan agama serta masyarakat yang melahirkan sebuah regulasi berupa denda maupun sanksi sosial. Penurunan angka kriminalitas tersebut tidak terlepas dari upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Forkopimda, dan masyarakat yang terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga Kamtimbas di wilayah Kabupaten Buton. Selain itu pula, dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama, pemerintah daerah juga bersinergi dengan forum-forum keagamaan seperti FKUB, MUI, dan membentuk tim penanganan konflik sosial daerah serta mendirikan rumah Tahfiz Alquran dan melaunching Desa Toleransi di Kecamatan Lasalimu Selatan.

Tabel 3. 15 Data Tindak Pidana di Kabupaten Buton

No.	Tahun Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Yang Diselesaikan
1.	2023	180 kasus	162 kasus

No.	Tahun Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Yang Diselesaikan
2.	2024	94 kasus	43 Kasus
3.	2025	231 kasus	170 Kasus

Sumber data : Satreskrim Polres Buton Tahun 2026

- **Persentase ormas aktif** di Kabupaten Buton pada tahun 2025 capaian kinerja sebesar 67,5%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 67,5 dibagi dengan target sebesar 100%. Realisasi persentase ormas aktif diperoleh dari data Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Buton, dimana pada tahun 2025 terdapat 40 Ormas/LSM yang ada di Kab. Buton, namun yang aktif hanya sebanyak 27 Ormas/LSM, 6 Ormas/LSM tidak memiliki SKT, dan 6 Ormas/LSM tidak jelas status keberadaannya, sementara 1 Ormas/LSM lainnya belum melapor ke Badan Kesbangpol.

  Organisasi masyarakat terdiri dari 2 yaitu ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dikatakan aktif setelah mendapatkan SK Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kemenkumham, yang berlaku seumur hidup. Sementara Ormas tidak berbadan hukum hanya memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kemendagri. SKT berlaku selama 5 tahun. Apabila setelah 5 tahun Ormas tersebut tidak memperpanjang SKT maka ormas tsb dikatakan tidak aktif.

10) Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai, akan mendorong pergerakan sektor-sektor perekonomian lainnya. Kondisi infrastruktur dasar yang ada hingga saat ini,dipandang masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton, dan

masih perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap infrastruktur tersebut.

Salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan aktivitas dalam segala bidang adalah infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendukung konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi.

Guna mengukur sejauhmana ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata di Kabupaten Buton, maka ditetapkan indikator berikut :

Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Indeks infrastrukur wilayah	%	**31,08**	**29,26**	**94,14**
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**94,14 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Dinas PUPR Kab.Buton Tahun 2026

- **Indeks infrastrukur wilayah**

  Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah memiliki peran yang vital dalam mendukung aktivitas masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi (PUPR, 2021). Lebih lanjut ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan daya saing suatu wilayah. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan infrastruktur yang tepat untuk mendukung perkembangan wilayah.

  Indeks infrastrukur wilayah Kabupaten Buton pada tahun 2025 **capaian kinerjanya sebesar 94,14**%. Capaian tersebut diperoleh dengan

membandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 29,26 dengan target kinerja sebesar 31,08. Indeks infrastruktur diperoleh dari panjang jalan Kabupaten Buton pada tahun 2025 sebesar 482,27 dibagi Luas wilayah administrasi yang dilayani sebesar 1.648,04 dikali 100. Menurunnya capaian kinerja dari tahun 2024 dikarenakan meningkatnya target kinerja namun panjang jalan Kabupaten Buton tidak mengalami perubahan/penambahan di tahun 2025.

11) Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik

Ketersedian energi istrik merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan sektor perekonomian. Ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, bisnis, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyaknya warga yang menikmati energi listrik. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan peningkatan kebutuhan energi listrik pada suatu wilayah maka dibutuhkan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di waktu mendatang dan upaya penghematan energi listrik. Untuk mengukur sejauh mana ketersediaan energy listrik di Kabupaten Buton, maka ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3. 17 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Energi Listrik

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Rasio Elektrifikasi	%	**99,75**	**91,67**	**91,89**
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**91,89 (Sangat Berhasil)**

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Buton Tahun 2026

- **Rasio Elektrifikasi** Kabupaten Buton Capaian kinerjanya pada tahun 2025 mencapai 91,89%. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi sebesar 91,67 dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 99,75%.

  Rasio elektrifikasi itu sendiri diperoleh dari perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.

  Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Buton, Pada Tahun 2025 tedapat penambahan jumlah rumah tangga yang berfasilitasi listrik sebesar 789 unit rumah sehingga total rumah tangga berfasilitasi Listrik adalah 22.797 unit rumah dengan jumlah rumah Kabupaten Buton sebesar 24.869 unit rumah, sehingga diperoleh realisasi Persentase unit rumah yang berfasilitasi listrik sebesar 91,67 %, dengan target yang ditetapkan 99,75% maka diperoleh capaian persentase unit rumah yang berfasilitasi listrik sebesar 91,89% **(sangat berhasil).**

  Berikut daftar Jumlah Rumah Tangga yang memiliki sumber penerangan atau terfasilitasi listrik pada tahun 2025 :

Tabel 3. 18 Jumlah Rumah Tangga Terfasilitasi Listrik

No	Kecamatan	Jumlah rumah Kab. Buton	Jumlah RT yang dipasang Listrik tahun 2025	Total Jumlah RT Berfasiilitasi listrik tahun 2025	Jumlah RT Belum Berlistrik Tahun 2025
1	Wabula	1202	72	1.131	71
2	Lasalimu Selatan	3528	146	3.458	70

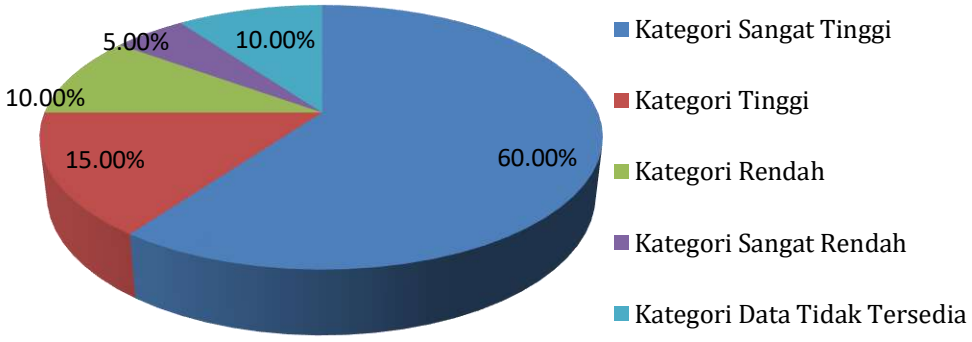
3	Wolowa	1489	32	1.069	420
4	Siotapina	3335	183	2.798	537
5	Pasarwajo	9577	272	8.666	911
6	Kapontori	3237	72	3.186	51
7	Lasalimu	2501	12	2.489	12
Jumlah		**24.869**	**789**	**22.797**	**2.072**

Sumber Data : Lakip Dinas Perkim Kab.Buton Tahun 2026

B.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 (RPJM 2025-2030)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama Pemkab.Buton yang termuat dalam RPJMD Kab.Buton Tahun 2025-2030, disimpulkan bahwa terdapat 12 (Dua Belas) capaian indikator sasaran atau sebanyak 60% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, 3 (tiga) Indikator sasaran atau sebesar 15% masuk dalam kategori tinggi, 2 (dua) Indikator sasaran atau sebesar 10% masuk dalam kategori rendah, namun ada 1 (satu) indikator sasaran atau 5% yang masuk dalam kategori sangat rendah, bahkan ada 2 (dua) indikator sasaran atau 10% yang datanya belum tersedia yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Ekonomi Biru. Berikut Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Pemkab.Buton Tahun 2025 :

Grafik 3. 17 Capaian IKU Bupati Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2025-2030)



Selanjutnya untuk evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja akan disajikan per-sasaran dengan uraian sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama

Kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan berkeadaban. Di tengah keragaman keyakinan, suku, dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Buton, terciptanya suasana saling menghormati dan menghargai antarumat beragama menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan daerah. Untuk mengukur sejauh mana tingkat kerukunan hidup dan toleransi antarumat beragama di Kabupaten Buton maka digunakan indikator dengan target dan realisasi serta capaian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kerukunan Hidup dan Toleransi Antar Umat Beragama

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	88,13	87,3	99,03
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**99,03 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Buton, 2026

- **Indeks Kerukunan Umat Beragama** adalah sistem scoring berbasis survei yang dikembangkan Kementerian Agama RI untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia. Dengan skala 0-100, indeks ini memberikan gambaran kuantitatif tentang kondisi harmoni sosial-keagamaan. Kerukunan Umat Beragama dalam survei ini didefinisikan sebagai suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta keberasamaan dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

  Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kab.Buton pada Tahun 2025 berada diangka 87,30. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yakni sebesar 87. Meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat dan penguatan nilai-nilai moderasi.

2) Sasaran 2 : Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan

Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara, Indonesia, dikenal dengan keberagaman budaya dan kehadiran masyarakat adat yang memiliki warisan budaya dan

tradisi yang kaya. Masyarakat adat di Buton umumnya terikat oleh nilai-nilai dan aturan adat yang diwariskan turun-temurun, serta memiliki kearifan lokal yang berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Masyarakat adat di Buton memiliki struktur sosial dan hukum adat yang khas, yang mengatur hubungan antarindividu dan komunitas serta hubungan dengan alam sekitar. Hukum adat ini sering kali mencakup aturan tentang kepemilikan tanah, penggunaan sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, Masyarakat adat Buton dikenal dengan berbagai kesenian tradisional, termasuk tarian, musik, dan kerajinan tangan. Tradisi ini tidak hanya merupakan bagian dari identitas budaya mereka tetapi juga berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan nilai-nilai dan sejarah komunitas. Masyarakat adat di Buton memiliki praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang sering kali diatur oleh pengetahuan tradisional dan sistem kepercayaan mereka. Ini termasuk praktik-praktik pertanian, perikanan, dan pengelolaan hutan yang selaras dengan ekosistem lokal. Keberadaan masyarakat adat juga menjadi faktor penting dalam pembangunan daerah, termasuk dalam pelestarian lingkungan dan promosi pariwisata budaya. Untuk mengukur sejauh mana Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Buton maka digunakan indikator dengan target dan realisasi serta capaian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 20 Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	53,40	…	…
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**...**

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab.Buton, 2026

- **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** adalah instrumen pengukur kemajuan pembangunan kebudayaan nasional dan daerah yang disusun oleh Kementerian Kebudayaan RI. IPK terdiri dari 7 dimensi utama dan puluhan indikator, meliputi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Hingga laporan ini disusun, Pemerintah Kabupaten Buton secara aktif tengah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai bagian dari strategi pelestarian dan pemajuan kebudayaan berbasis komunitas. PPKD ini menjadi pijakan penting dalam mendukung, sehingga untuk Capaian Tahun 2025 datanya belum tersedia.

3) Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Keadaan ini diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Buton. Pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan

kejaksaan) berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Untuk mengukur sejauhmana terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat, maka ditetapkan indikator beserta target kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 21 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	*Crime Rate*	Per 100.000 Pddk	80,00	188,69	(35,86)
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**(35,86) (Sangat Berhasil)**

Sumber : Satreskrim Polres Buton, 2026

- ***Crime Rate*** di Kabupaten Buton pada tahun 2025 capaian kinerjanya mencapai Nihil (35,86)%. Capaian ini diperoleh dari realisasi Crime rate sebesar 188,69 dibagi dengan target sebesar 80,00. Angka Crime Rate atau Tingkat resiko Penduduk terkena Kejahatan diperoleh dengan rumus perhitungan :

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah keseluruhan Penduduk di Kab Buton}} \times 100.000$$

Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Buton menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 231 jumlah perkara tindak pidana yang laporannya masuk ke Polres Buton, dibagi dengan total jumlah penduduk sebanyak 122.423 jiwa dikali 100.000, sehingga didapatkan realisasi sebesar 188,69%. Tingginya angka Crime rate ini menunjukan rendahnya tingkat keamanan. Untuk menekan angka *crime rate* (tingkat kriminalitas) memerlukan pendekatan komprehensif yang

menggabungkan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Langkah utama meliputi penguatan patroli polisi, peningkatan pendidikan dan lapangan kerja, edukasi hukum, peran aktif masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan tegas.

4) Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab menjadi kunci tercapainya pemerintahan yang berkualitas. Pemerintahan yang bersih, baik dan berkualitas akan memberikan dampak pada pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka ditetapkan indikator kinerja beserta target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai SAKIP Kabupaten Buton	Poin	65,00	63,73	98,04
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**98,04 (Sangat Berhasil)**

Sumber : LHE KemenpanRB, 2026

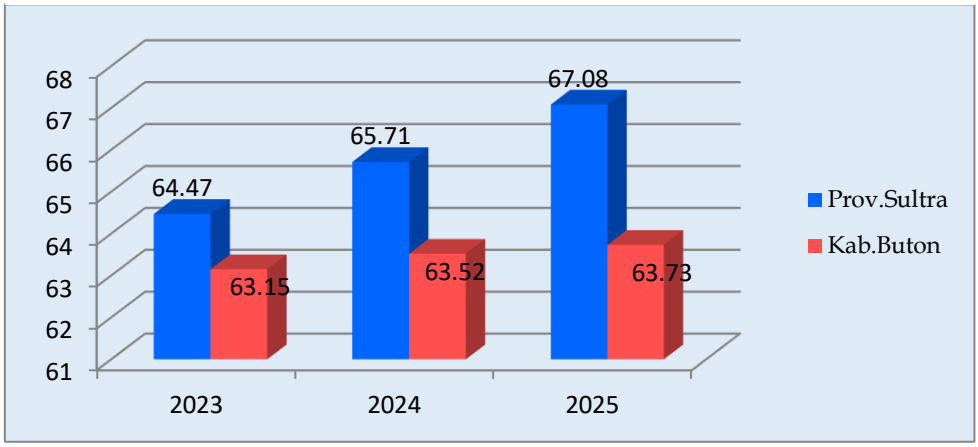
- **Nilai Sakip Kabupaten Buton** pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 102,79%. Capaian ini diperoleh dari nilai hasil Sakip Kabupaten Buton sebesar 63,73 (B) dibandingkan dengan target kinerja sebesar 62 (B). Capaian kinerja nilai SAKIP menunjukkan kenaikan yang baik selama tahun 2023 – 2025, meskipun masih pada kategori yang sama namun nilai SAKIP pada tahun 2025 kembali meningkat dari capaian tahun 2024 yang hanya sebesar 63,52 dan nilai

ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perolehan nilai Sakip Prov.Sultra sebesar 67,08 pada tahun 2025.

Berbagai kebijakan peningkatan nilai SAKIP terus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan perencanaan dan efektifitas pemilihan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung kinerja sasaran strategis. Selain itu, berbagai kegiatan dan dokumen pendukung untuk meningkatkan kualitas SAKIP terus dilakukan diantaranya menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, melakukan review SOP, peningkatan kompetensi tim penyusun SAKIP perangkat daerah, dan menyusun Proses Bisnis Internal pemerintahan. Pemerintah daerah berharap dengan pembenahan hasil rekomendasi penilaian dari Tim Evaluasi Kemenpan RB dapat meningkaatakan nilai predikat di tahun berikutnya, dengan harapan kategori ini mendapat penghargaan atas penilaian kinerja Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Kemenpan RB Republik Indonesia sebagai lembaga yang menilai kinerja Pemerintah daerah.

Berikut perbandingan nilai Sakip Kab.Buton terhadap Nilai Sakip Prov.Sultra kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 18 Perbandingan Nilai Sakip Kab.Buton Terhadap Nilai Sakip Prov.Sultra



Sumber : Hasil Evaluasi Kemenpan RB

5) Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan

Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah.. Untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Pendidikan	Poin	78,11	22,66	28,75
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**28,75 (Tidak Berhasil)**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Buton Tahun 2026

- **Indeks Pendidikan** adalah komponen penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kualitas SDM berdasarkan dimensi pengetahuan, menurut Wikipedia. Indikator utamanya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian pendidikan penduduk. Pada tahun 2025 Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buton mencapai 13,97, sementara untuk Rata-rata Lama Sekolah berada diangka 8,69, sehingga setelah diformulasikan diperoleh Indeks Pendidikan sebesar 22,66. Peningkatan kinerja indeks pendidikan dapat dicapai melalui perbaikan akses, kualitas guru, bantuan pendidikan, fasilitas sekolah, kesadaran masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang mendukung.

6) Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan

selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kesehatan	Poin	77,81	77,65*	99,79
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**99,79 (Sangat Berhasil)**

Sumber : RPJMD Kab.Buton 2025-2030

- **Indeks kesehatan** adalah ukuran komposit atau indikator statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan, derajat kesehatan masyarakat, atau kualitas hidup di suatu wilayah. Indeks ini dihitung berdasarkan berbagai indikator seperti angka harapan hidup, prevalensi penyakit, dan akses pelayanan kesehatan, yang sering menjadi komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

  Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2020, usia harapan hidup tercatat sebesar 70,03 tahun dan meningkat menjadi 70,47 tahun pada tahun 2024. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk hidup hingga usia 70–71 tahun. Kenaikan ini berjalan seiring dengan peningkatan Indeks Kesehatan yang juga menunjukkan tren positif, yaitu dari 76,97 pada tahun 2020 menjadi 77,65 pada tahun 2024. Perbaikan tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas

layanan kesehatan, gizi masyarakat, serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Buton. Dari indikator usia harapan hidup, terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan secara simultan, dimana usia harapan hidup masyarakat pada tahun 2020 sebesar 68,25 tahun meningkat hingga menjadi 70,47 tahun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 70-71 tahun. Kenaikan ini berbanding lurus dengan pencapaian Indeks Kesehatan yang terus meningkat hingga mencapai 77,65 pada tahun 2024.

7) Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas keluarga yang Sejahtera dan sesuai norma kehidupan Masyarakat

Pembangunan keluarga merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kualitas, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan serta pengasuhan yang tepat, sehingga tercipta keluarga yang tenteram, mandiri, dan bahagia. Fokusnya adalah membangun generasi sehat, berpendidikan, dan berkarakter, yang berperan penting bagi ketahanan nasional..Untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya kualitas keluarga yang Sejahtera dan sesuai norma kehidupan Masyarakat, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas keluarga

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,1	64,2	105,07
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**105,07 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

- **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** Kabupaten Buton menunjukkan tren positif selama periode 2021–2024, dari 52,36 menjadi 59,9, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 yang mencapai 60,07. Capaian ini mencerminkan penguatan kualitas ketahanan keluarga, baik dari aspek kemandirian, ketangguhan, maupun keharmonisan, yang tidak lepas dari implementasi berbagai program peningkatan kualitas keluarga. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 sebesar 59,9, namun pada tahun 2025 kembali naik hingga mencapai angka 64,42. capaian tersebut tetap mengindikasikan bahwa Kabupaten Buton telah berhasil menjaga stabilitas pembangunan keluarga. Namun demikian, tantangan seperti pemerataan layanan di wilayah terpencil, literasi keluarga, dan kolaborasi lintas sektor masih perlu diatasi melalui pendekatan berbasis data dan nilai kearifan lokal agar pembangunan keluarga yang berkualitas dapat terus berkelanjutan.

8) Sasaran 8 : Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan

Kondisi ideal dalam pembangunan manusia adalah tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pembangunan, serta merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara. Sebaliknya, diskriminasi gender dalam pembangunan dapat menimbulkan perbedaan hasil pembangunan antara

laki-laki dan perempuan. Untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas keluarga yang Sejahtera dan sesuai norma kehidupan Masyarakat

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,459	0,518**	87,14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**87,14 (Berhasil)**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 2026

- **Indeks Ketimpangan Gender** Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Nilai Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Buton yang semakin kecil mengindikasian bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan gender semakin membaik. Pada tahun 2020, IKG berada pada angka 0,576 dan terus menurun setiap tahunnya hingga mencapai 0,518 pada tahun 2024, sementara untuk IKG Tahun 2025 hingga saat ini belum dirilis. Penurunan IKG di Kabupaten Buton mencerminkan menurunnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta akses terhadap pasar tenaga kerja. Kedepannya untuk lebih menekan angka IKG maka diperlukan upaya-upaya konkrit diantaranya peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi perempuan, kesetaraan upah, pemberdayaan ekonomi (UMKM), serta penguatan kebijakan hukum anti-diskriminasi. Strategi

utamanya adalah pengarusutamaan gender, peningkatan partisipasi politik perempuan, dan mengubah norma budaya yang merugikan.

9) Sasaran 9 : Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Selain aspek ekonomi, kemiskinan juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap kesempatan yang lebih baik, seperti pekerjaan layak dan partisipasi sosial. Penyebab kemiskinan sangat kompleks dan bervariasi antarwilayah. Faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi, inflasi, dan rendahnya kualitas pendidikan menjadi pemicu utama yang memperburuk kondisi masyarakat miskin. Untuk mendukung tercapainya sasaran Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Capaian Kinerja Sasaran Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Kemiskinan	%	13,04	13,46	96,77
2	Rasio Gini	Poin	0,312	0,35	87,82
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**92,29 (Sangat Berhasil)**

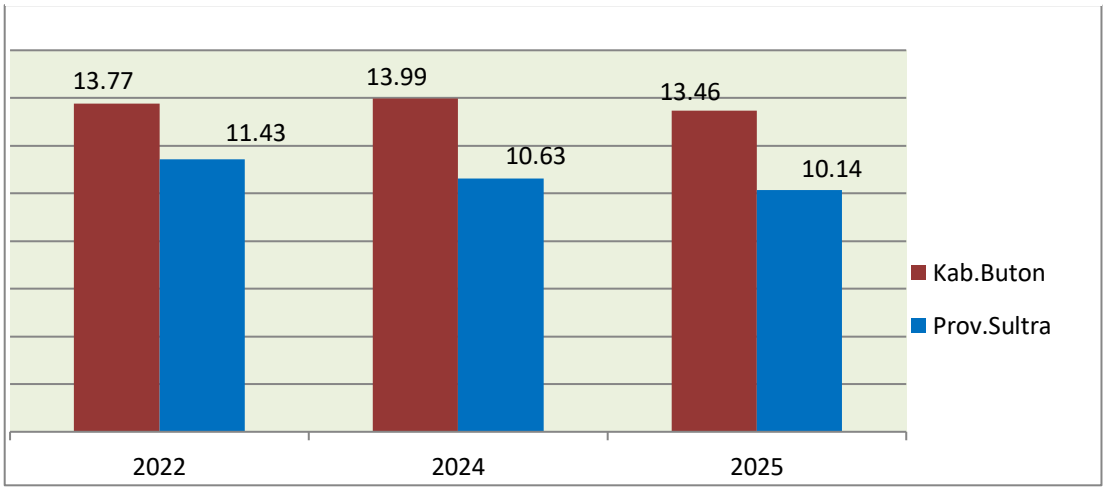
Sumber : BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka 2026

- **Tingkat Kemiskinan,** untuk mengukur tingkat kemiskinan Badan Pusat Statitik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Buton cukup fluktuatif selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dimana Tahun 2023 tingkat kemiskinan berada diangka 13,77%, kemudian di tahun 2024 naik menjadi 13,99% namun pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan pada angka 13,46. Namun angka ini masih jauh di atas angka Kemiskinan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana pada tahun 2025 mencapai angka 10,14% pada September 2025. Pemerintah Kab.Buton melakukan percepatan penghapusan kemiskinan secara tepat sasaran melaui strategi kebijakan yang meliputi Upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, serta pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi.

Dengan Program kegiatan yang saling terintegrasi akan mampu memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buton. Berikut Perbandingan Angka Kemiskinan Kab. Buton Terhadap Angka Kemiskinan Prov.Sultra selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir:

Grafik 3. 19 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kab. Buton Terhadap Tingkat Kemiskinan Prov.Sultra Tahun 2023-2025



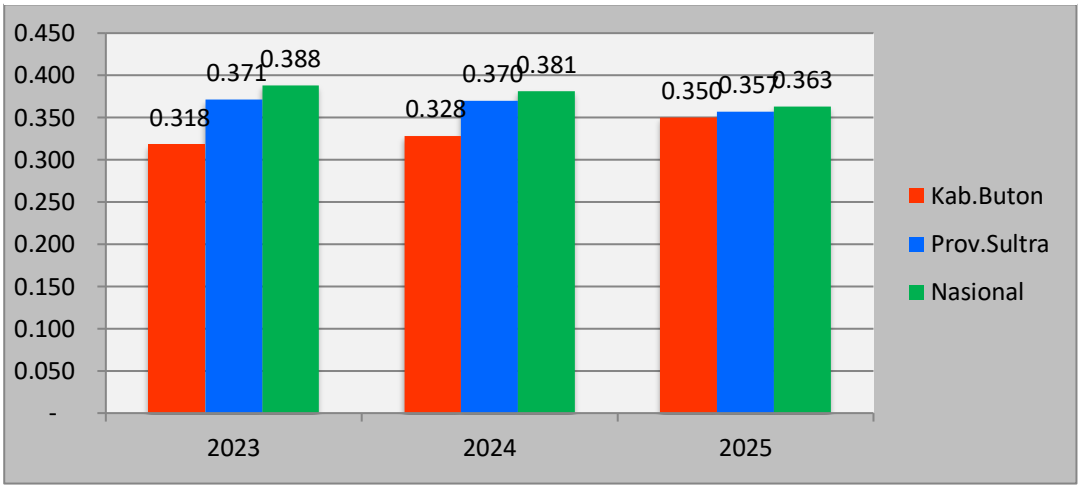
Sumber data : https://sultra.bps.go.id,2026 dan BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka 2026

Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kabupaten Buton telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMAS, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya.

- **Gini Ratio** merupakan gambaran pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Ketimpangan ekonomi ataupun distribusi pendapatan yang diukur dengan gini ratio ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang bersikar dari 0 (0%) sampai 1 (100%). Nilai 0 menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna sedangkan nilai 1 menggambarkan ketidaksempurnaan. Artinya bila sebuah Negara mempunyai gini ratio bernilai 0 maka distribusi pendapatan penduduk yang ada dalam Negara tersebut.

  Perkembangan indeks Gini Ratio Kabupaten Buton kurun waktu 3 tahun (2023-2025) cukup fluktatif atau turun naik dari tahun ketahun. Pada tahun 203 Gini Ratio Kabupaten Buton berada pada angka 0,318, kemudian pada tahun 2024 naik menjadi 0,328, dan terakhir di tahun 2025 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,350. kenaikkan gini ratio ini disebabkan oleh pertumbuhan pengeluaran masyarakat kelompok atas yang lebih pesat dibanding pertumbuhan pengeluaran kelompok lain. Namun keadaan ini masih sedikit dibawah rata-rata gini ratio Sulawesi tenggara dan Nasional. Rata-rata gini ratio Kabupaten Buton sebesar 0,350 sedangkan rata-rata gini ratio provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional masing- masing sebesar 0,357 dan 0,363.

Grafik 3. 20 Gini Ratio Nasional, Prov Sultra, Kabupaten Buton Tahun 2023-2025



Sumber data : https://sultra.bps.go.id,20256

10) Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton, percepatan pemerataan pembangunan dan penataan wilayah yang berkualitas serta ramah lingkungan menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah. Melalui kebijakan yang terarah, pemerintah setempat berupaya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di daerah perkotaan, tetapi juga merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton. Hal ini dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik yang mencakup daerah-daerah pedesaan yang sebelumnya terpinggirkan. Tak hanya itu, penataan wilayah yang ramah lingkungan juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Melalui penggunaan teknologi hijau, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan promosi penggunaan energi terbarukan, Kabupaten Buton berupaya membangun lingkungan yang berkelanjutan dan lestari. Dengan demikian, pembangunan jangka menengah di Kabupaten Buton bukan hanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Untuk mendukung tercapainya

sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	83,79	85,46	101,99
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**101,99 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buton Tahun 2026

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** di Kabupaten Buton Buton menjadi salah satu permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam arah pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Buton pada tahun 2025 tercatat sebesar 85,46 (hasil IKLH tahun 2025 dihitung berdasarkan pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup) yang masih berada dalam kategori sedang, menunjukkan adanya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aktivitas ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap struktur PDRB daerah, berimplikasi pada kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, degradasi tanah, serta peningkatan risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini menandakan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Pengelolaan sampah dan

limbah juga masih menjadi tantangan. Belum optimalnya penerapan Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, memperburuk kondisi lingkungan dan menambah beban pada sistem pengelolaan bencana. Sementara itu, dari sisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Untuk itu , Kabupaten Buton perlu mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan. Rehabilitasi lingkungan pasca-tambang, peningkatan kualitas pengelolaan sampah, serta perlindungan kawasan hutan dan pesisir merupakan langkah krusial yang perlu diakselerasi. Selain itu, penting untuk mendorong diversifikasi ekonomi daerah ke sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan seperti pertanian berkelanjutan, perikanan tangkap dan budidaya yang bertanggung jawab, serta pengembangan ekowisata. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan bencana akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pembangunan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

11) Sasaran 11 : Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah

Kabupaten Buton merupakan daerah yang dikategorikan wilayah rawan bencana yang diakibatkan perubahan iklim sebagai salah satu dampak dari tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terjadi baik secara alami ataupun atas campur tangan aktivitas manusia. Dampak lain dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, wilayah Kabupaten Buton yang sebagian besar berada diwilayah pesisir, menjadikan Kabupaten Buton sebagai daerah rawan bencana alam seperti tanah longsor, gelombang pasang, dan banjir. Untuk mengukur sejauh mana Ketahana Daerah dalam menghadapi bencana, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketangguhan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,38	0,40*	105,26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**105,26 (Berhasil)**

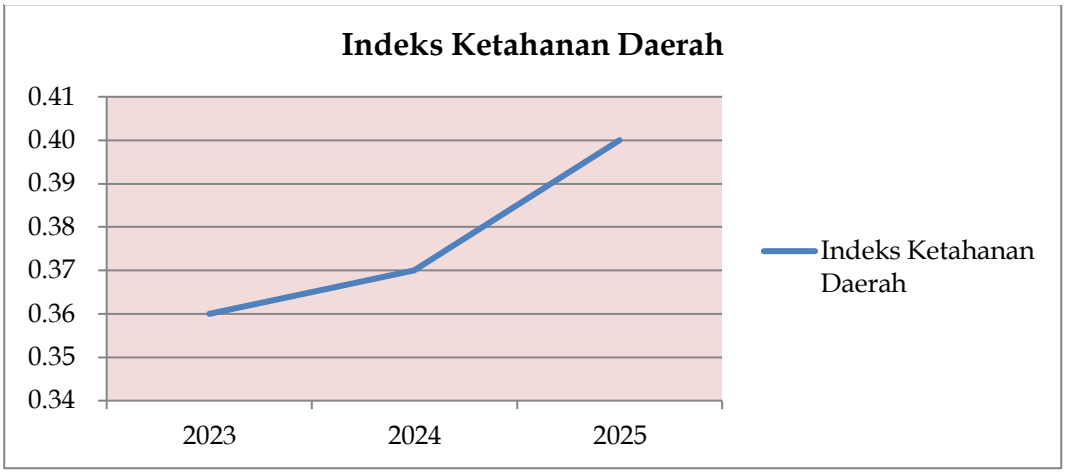
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Buton Tahun 2026

- **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)** Kabupaten Buton fokus dalam upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana yang dapat terjadi setiap saat dan dapat berdampak besar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka harus terus melakukan Mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berdasarkan penilaian kapasitas secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Buton dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks ketahann derah cenderung meurun selama 5 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2020 Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,61, dan pada tahun 2024 menjadi 0,37, dan pada tahun 2025 IKD Kabupaten Buton berada pada angka 0,40 (angka sementara). IKD = Indeks Kapasitas / (Indeks Bahaya * Indeks Kerentanan). Pengukuran IKD menggunakan 71 indikator yang mencakup 7 prioritas utama—seperti:
  1) Penguatan Tata Ruang: Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis pengurangan risiko bencana.
  2) Kapasitas Dasar: Peningkatan kapasitas sekolah/madrasah aman bencana.
  3) Penguatan Fasilitas Kesehatan: Penerapan modul Safety Hospital pada Rumah Sakit dan Puskesmas.
  4) Replikasi Desa Tangguh Bencana (Destana): Replikasi mandiri ke desa tetangga.

5) Pencegahan dan Mitigasi: Peningkatan efektivitas tindakan pencegahan.
6) Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat: Perkuatan respon cepat.
7) Sistem Pemulihan: Pengembangan sistem pasca bencana.

Nilai IKD yang masih rendah menunjukkan Tingkat Kapasitas Daerah Rendah. Merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buton masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Berikut capaian kinerja Indeks ketahanan daerah Kabupaten Buton tahun 2023-2025:

Grafik 3. 21 Trend Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2025



Sumber : BPBD Kab.Buton Tahun 2026

12) Sasaran 12 : Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas

Pengembangan wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan dengan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Buton. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan wilayah ini tercermin dalam peningkatan Indeks Infrastruktur. Untuk mendukung

tercapainya sasaran Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) Berkualitas

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	%	55,51	68,67	123,70
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**123,70 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab.Buton Tahun 2026

- **Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman** Merupakan ukuran komposit yang menilai kinerja dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dasar di lingkungan hunian, seperti jalan lingkungan, air minum, sanitasi, dan drainase. Indeks ini mencakup persentase kawasan bebas kumuh, akses air bersih, dan persentase PSU layak huni. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab.Buton, Indeks Kawasan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kab.Buton pada tahun 2025 berada pada angka 68,67. Angka ini diperoleh dari nilai rata rata dari perentasi rumah layak huni, jalan lingkungan,listrik, kawasan kumuh, air minum.

13) Sasaran 13 : Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana Pembangunan di seluruh wilayah

Pengembangan wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Buton. Pembangunan kawasan perkotaan diarahkan untuk menjadi pusat jasa dan perdagangan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan, sementara perdesaan

didorong untuk tumbuh mandiri melalui optimalisasi potensi lokal. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan wilayah ini tercermin dalam peningkatan Indeks Infrastruktur. Untuk mengukur sejauh mana capaian pemerataan sarana dan prasarana Pembangunan di seluruh wilayah, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	74,93	79,67	106,32
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**106,32 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Buton Tahun 2026

- **Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum** Kabupaten Buton menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Buton, Indeks Infrastruktur Kab.Buton Tahun 2025 berada pada angka 79,67%. Angka ini diperoleh dari Perbandingan kinerja bidang pekerjaan umum dengan total kinerja bidang pekerjaan umum dikalikan 100. Indeks ini naik dari 74,84 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan hasil dari investasi infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya, yang menjadi fondasi penting dalam mendukung konektivitas wilayah, akses layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton. Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Kabupaten Buton sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan

bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, drainase dan lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

14) Sasaran 14 : Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA

Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis SDA difokuskan pada optimalisasi potensi lokal—pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata—melalui hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah. Strategi ini melibatkan penguatan UMKM, penerapan teknologi digital, serta kemitraan dengan pihak swasta/pendidikan guna menciptakan produk berdaya saing global dan berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana capaian meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp	3,346,59	3,3788,50	113,20
2	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	%	21,27	22,13	104,04
3	Indeks Ekonomi Biru	Poin	49,72	….	-
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**108,62 (Sangat Berhasil)**

Sumber : BPS Kab.Buton 2026

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, income per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

- **Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian** di Kabupaten Buton pada Tahun 2025, capaian kinerjanya sebesar 113,20%. Angka ini diperoleh dari realisasi sebesar 3,788,50 dibagi target kinerja sebesar 3,346,59 (juta rupiah). Nilai realisasi tersebut diperoleh dari menjumlahkan seluruh sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian dibagi dengan Total PDRB Kab.Buton pada tahun 2025.
- **Kontribusi Seluruh Sektor Pertanian** di Kabupaten Buton pada Tahun 2025, capaian kinerjanya sebesar 104,04%. Angka ini diperoleh dari realisasi sebesar 22,13 dibagi target kinerja sebesar 21,27. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari membandingkan PDRB Sektor Pertanian dibagi dengan Total PDRB Kab.Buton pada tahun 2025. Berikut Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton (persen), 2023–2025:

Tabel 3. 33 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha		
	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,27	**21,66**	**22,13**

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha		
	2023	2024	2025
Pertambangan dan Penggalian	39,35	34,55	32,05
Industri Pengolahan	2,13	2,50	3,01
Pengadaan Listrik dan Gast	0,04	0,04	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,38	0,37	0,36
Konstruksi	5,30	6,14	5,83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	14,78	15,48	17,01
Transportasi dan Pergudangan	0,83	0,89	0,88
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,12	0,12	0,15
Informasi dan Komunikasi	0,26	0,28	0,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,68	0,72
Real Estatet	0,44	0,43	0,41
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02
Adm. Pemerintahan,Pertahanan	8,24	10,02	10,03

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha		
	2023	2024	2025
JamSos Wajib			
Jasa Pendidikan	5,32	5,43	5,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,80	0,78
Jasa lainnya	0,60	0,59	0,58
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS.go.id, 2026

- **Indeks Ekonomi Biru,** Penerapan prinsip ekonomi biru di Kabupaten Buton terus diintegrasikan dalam pembangunan ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan yang selaras dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan ini tercermin dalam penguatan sektor-sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada pengembangan ekonomi biru yang fokus pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir juga terus diperkuat. Target Indeks Ekonomi Biru yang ditetapkan sebesar 49,72 menjadi indikator bahwa Kabupaten Buton menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya kelautan secara inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencapai 10,66% pada tahun 2021, meningkat menjadi 12,11% pada 2022, dan meskipun sedikit menurun ke angka 11,80% pada tahun 2023, tetap menunjukkan peran penting sektor ini dalam struktur ekonomi daerah. Capaian tersebut mencerminkan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi

biru di Buton, dengan potensi besar untuk dikembangkan melalui penguatan infrastruktur pelabuhan, modernisasi sarana tangkap, serta pengelolaan kawasan konservasi laut dan budidaya berkelanjutan. Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Buton pada tahun 2025, belum dirilis/data belum tersedia, dikarenakan masih dalam proses penyusunan/pemenuhan indikator.

15) Sasaran 15 : Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA

Dalam rangka perwujudan akselerasi pembangunan ekonomi di daerah adalah dengan menciptakan kinerja ekonomi berbasis hilirisasi, khususnya pada hilirisasi potensi unggulan daerah. Hilirisasi merupakan suatu proses pengolahan suatu barang untuk meningkatkan nilai tambah sehingga lebih bernilai jual. Tujuan akhir dari hilirisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja. Untuk mengukur sejauh mana capaian meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	2,89	3,01	104,15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**104,15 (Sangat Berhasil)**

Sumber : BPS Kab.Buton

- **Kontribusi PDRB industri pengolahan**, di Kabupaten Buton pada Tahun 2025, capaian kinerjanya sebesar 104,15%. Angka ini diperoleh dari realisasi sebesar 3,01 dibagi target kinerja sebesar 2,89. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari membandingkan PDRB Sektor Pengolahan dibagi dengan Total PDRB

Kab.Buton pada tahun 2025. Meskipun capaian kinerja nya tinggi namun realisasi Kontribusi PDRB Sektor Pengolahan terbilang rendah terhadap PDRB Kabupaten Buton. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengembangan sektor pengolahan yang lebih bernilai dan memiliki daya saing yang tinggi. Potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Buton, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan kelautan, masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya infrastruktur pengolahan dan pemasaran yang dapat meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Akibatnya, sebagian besar hasil alam yang diproduksi di Kabupaten Buton hanya dijual dalam bentuk mentah tanpa adanya proses hilirisasi yang dapat menambah nilai dan manfaat ekonomi yang lebih besar. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi daerah tidak tergali secara optimal, sehingga berdampak pada terbatasnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kontribusi sektor pengolahan yang relatif rendah dan ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif, Kabupaten Buton menghadapi tantangan besar dalam menciptakan perekonomian yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penguatan hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton.

16) Sasaran 16 : Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah

Daya saing ekonomi daerah adalah kemampuan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) untuk mengoptimalkan potensi, produktivitas, dan inovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana capaian meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 35 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	3,02	2,27	90,06
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**104,15 (Sangat Berhasil)**

Sumber : BPS.go.id

- **Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara** pada Tahun 2025, capaian kinerjanya sebesar 90,06%. Angka ini diperoleh dari realisasi sebesar 2,27 dibagi target kinerja sebesar 3,02. Realisasi itu sendiri diperoleh dari PDRB Kabupaten Buton dibagi dengan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah yang saat ini masih didominasi KBI. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton pada tahun 2025 berdasarkan data BPS Kab.Buton pada Buton Dalam Angka 2026 sebesar 5.575,58 Milyar rupiah, sedangkan PDRB Prov.Sultra. Tahun 2025 sebesar 204,33 triliyun rupiah atau 2024.330 milyar rupiah.

17) Sasaran 17 : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas

Daya saing ekonomi daerah adalah kemampuan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) untuk mengoptimalkan potensi, produktivitas, dan inovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana capaian meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah, maka digunakan indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,83	3,30	61,34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**61,34 (Rendah)**

Sumber : BPS.go.id

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**, Angkatan kerja yang bertambah harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

  Dalam lingkup Kabupaten Buton, TPT dalam kurun waktu 3 tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2023 TPT kabupaten Buton menurun dari Tahun 2022 yakni dari 2,99 turun menjadi 2,48 di tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2,95, dan pada tahun 2025 kembali meningkat diangka 3,30 . Meningkatknya angka TPT di Kabupaten Buton disebabkan oleh beberapa Faktor diantaranya:

  a. Banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Buton

b. Tidak seimbangnya kesempatan kerja dan lowongan pekerjaan perusahaan yang tersedia di Kabupaten Buton berdasarkan belum adanya laporan perusahaan mengenai informasi lowongan kerja tersedia pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, dan
c. Keterbatasan informasi akurat jumlah tenaga kerja yang bekeja di Kabupaten Buton, di bandingkan dengan total angkatan kerja dari BPS

Untuk menurunkan TPT di Kabupaten Buton, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya:

a. Pelatihan Berbasis Kompetensi

   Untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar pasar kerja. Program pelatihan diarahkan pada sektor unggulan daerah sehingga lulusan memiliki peluang kerja lebih besar.
b. Pengembangan Program Kewirausahaan

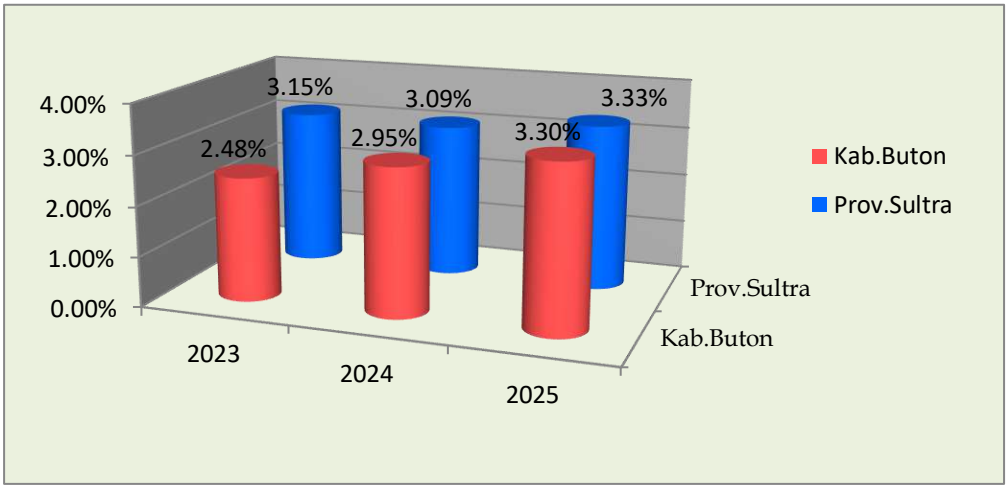
   Selain penempatan kerja formal dan pelatihan kerja berbasis kompetensi, dinas tenaga kerja melaksanakan program pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan kewirausahaan usaha mandiri dan pendampingan usaha bagi kelompok-kelompok industri tertentu. Program ini bertujuan menciptakan wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja tambahan.
c. Pelaksanaan Program Padat Karya

   Program padat karya dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menyerap tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau terdampak kondisi ekonomi. Selain memberikan penghasilan sementara, program ini juga meningkatkan daya beli masyarakat.
d. Sinergi Lintas Sektor

Penanganan pengangguran memerlukan kolaborasi dengan OPD lain, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta pemerintah desa/kelurahan. Sinergi ini penting untuk memastikan program pengurangan pengangguran berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara umum TPT Kabupaten Buton sedikit lebih rendah jika dibandingkan TPT di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 3,33 pada November 2025. Berikut Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Buton Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Prov.Sultra selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir:

Grafik 3. 22 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab.Buton Terhadap TPT Prov. Sultra Tahun 2023-2025



Sumber data : https://sultra.bps.go.id,2026 dan BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka 2026

C. Akuntabilitas Keuangan

APBD Kabupaten Buton pada tahun 2025 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp. **778,164,519,682.00** dan belanja sebesar Rp. **807,136,748,164.00** sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 28.972.228.482,00 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Buton TA 2025 untuk pendapatan sebesar Rp. **743,341,775,078.10**

dan realisasi belanja Rp **756,079,660,607.00**. Berikut rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025:

Tabel 3. 37 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
4	**PENDAPATAN**	**778,164,519,682.00**	**743,341,775,078.10**	**(34,822,744,603.90)**	**95.53**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**58.052.645.986,00**	**49,961,221,595.10**	**(8,091,424,390.90**	**86.06**
4.1.1	Pajak Daerah	17,455,713,297.00	8,343,569,546.00	(9,112,143,751.00)	47.80
4.1.2	Retribusi Daerah	3,025,000,000.00	2,967,560,075.00	(57,439,925.00)	98.10
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,803,238,442.00	12,745,238,442.00	(58,000,000.00)	99.55
4.1.4	Lain-kain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24,768,694,247.00	25,904,853,532.10	1,136,159,285.10	104.59
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**709,184,854,119.00**	**684,714,489,426.00**	**24,470,364,693.00**	**96,55**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	686,583,843,200.00	663,187,017,044.00	(23,396,826,156.00)	96.59
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,601,010,919.00	21,527,472,382.00	(1,073,538,537.00)	95.25
4.3	**LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**10,927,019,577.00**	**8,666,064,057.00**	**(2,260,955,520.00)**	**39.14**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Lain- Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perudang- Undangan	10,927,019,577.00	8,666,064,057.00	(2,260,955,520.00)	39.14
5	**BELANJA DAERAH**	**807,136,748,164.00**	**756,079,660,607.00**	**(51,057,087,557.00)**	**93.67**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
5.1	**BELANJA OPERASI**	**579,292,095,023.00**	**544,575,135,152.00**	**(34,716,959,871.00)**	**94.01**
5.1.1	Belanja Pegawai	422,480,587,186.00	398,468,774,871.00	(24,011,812,315.00)	94.32
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155,833,447,465.00	145,534,639,909.00	(10,298,807,556.00)	93.39
5.1.4	Belanja Subsidi	72,505,000.00	72,505,000.00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	841,555,372.00	499,215,372.00	(342,340,000.00)	59.32
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	64,000,000.00	0,00	(64,000,000.00)	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**117,987,285,641.00**	**108,375,165,309.00**	**9,612,120,332.00**	**91.85**
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	27,671,714,863.00	27,004,851,762.00	(666,863,101.00)	97.59
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	65,309,953,659.00	57,032,618,268.00	(8,277,335,391.00)	87.33
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	24,742,007,619.00	24,137,695,279.00	(604,312,340.00)	97,56
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	263,609,500.00	200,000,000.00	(63,609,500.00)	75.87
5.2.6	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**200,000,000.00**	**3,295,200.00**	**(196,704,800.00)**	**1.64**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	200,000,000.00	3,295,200.00	(196,704,800.00)	1.64
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**109,657,367,500.00**	**103,126,064,946.00**	**(6,531,302,554.00)**	**94.04**
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	109,657,367,500.00	103,126,064,946.00	(6,531,302,554.00)	94.04
	SURPULUS/DEFISIT	(28,972,228,482.00)	(12,737,885,528.90)	16,234,342,953.10	43.97

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**28,972,228,482.00**	**28,972,228,482.97**	**0.97**	**100**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	28,972,228,482.00	28,972,228,482.97	0.97	100
	PEMBIAYAAN NETTO	**28,972,228,482.00**	**28,972,228,482.97**	**0.97**	**100**
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	**0,00**	**16,234,342,954.07**	**16,234,342,954.07**	**0,00**

Tabel 3. 38 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan berdasarkan Urusan dan Unsur

Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
URUSAN WAJIB	**504.140.149.779,00**	**486.974.218.241,00**	**96,60**
Pendidikan	263.665.997.008,00	251.373.753.562,00	95,34
Kesehatan	191.022.129.826,00	188.590.554.624,00	98,73
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.523.235.771,00	32.081.687.588,00	95,70
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.856.294.602,00	2.674.870.580,00	93,65
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.615.661.147,00	10.478.284.231,00	98,71
Sosial	2.456.831.425,00	1.775.067.656,00	72,25
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	**47.962.017.570,00**	**42.714.218.177,00**	**89,06**
Tenaga Kerja	1.797.750.046,00	1.764.302.059,00	98,14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.476.829.292,00	5.264.313.027,00	96,12
Pangan	1.432.627.394,00	1.308.342.632,00	91,32
Lingkungan Hidup	4.063.814.447,00	3.540.897.846,00	87,13
Administrasi Kependudukan dan Capil	1.649.623.134,00	1.524.842.642,00	92,44
Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.192.802.210,00	3.127.378.127,00	97,95
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.195.196.804,00	4.262.979.001,00	82,06

Perhubungan	6.318.793.930,00	3.923.803.092,00	62,10
Komunikasi dan Informatika	3.660.377.800,00	3.561.604.645	97,30
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.971.483.444,00	1.655.768.211,00	83,99
Penanaman Modal	1.951.341.296,00	1.937.603.994,00	99,30
Kepemudaan dan Olahraga	5.647.445.296,00	5.348.020.255,00	94,70
Statistik	120.488.014,00	113.665.400,00	94,34
Persandian	8.182.000,00	6.829.950,00	83,48
Kebudayaan	2.842.946.432,00	2.796.172.295,00	98,35
Perpustakaan	2.607.543.831,00	2.552.922.801,00	97,91
Kearsipan	24.772.200,00	24.772.200,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**17.201.687.635,00**	**16.633.136.473,00**	**96,69**
Kelautan dan Perikanan	3.264.836.371,00	3.053.535.864,00	93,53
Pariwisata	2.464.012.716,00	2.433.490.011,00	98,76
Pertanian	6.692.536.663,00	6.556.334.050,00	97,96
Perdagangan	1.333.361.706,00	1.218.570.293,00	91,39
Perindustrian	2.355.035.592,00	2.319.409.078,00	98,49
Transmigrasi	1.091.904.587,00	1.051.797.177,00	96,33
UNSUR PENDUKUNG URU- SAN PEMERINTAHAN	**52.186.096.638,00**	**47.603.851.543,00**	**91,22**
Sekretariat Daerah	26.580.631.634,00	25.454.723.134,00	95,76
Sekretariat DPRD	25.605.465.004,00	22.149.128.409,00	86,50
UNSUR PENUNJANG URU- SAN PEMERINTAHAN	**165.913.154.756,00**	**143.595.072.049,00**	**86,55**
Perencanaan	2.995.320.383,00	2.946.911.991,00	98,38
Keuangan	123.108.959.565,00	115.262.157.848,00	93,63
Kepegawaian	37.911.032.259,00	23.693.678.765,00	62,50
Penelitian dan Pengembangan	1.897.842.549,00	1.692.323.445,00	89,17
UNSUR PENGAWASAN URU- SAN PEMERINTAHAN	**2.538.943.177,00**	**2.364.584.996,00**	**93,13**
Inspektorat	2.538.943.177,00	2.364.584.996,00	93,13
UNSUR KEWILAYAHAN	**13.948.525.178,00**	**13.150.147.399,00**	**94,28**
Kecamatan	13.948.525.178,00	13.150.147.399,00	94,28

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**3.246.173.431,00**	**3.044.431.729,00**	**93,79**
Kesatuan Bangsa dan Politik	3.246.173.431,00	3.044.431.729,00	93,79
Jumlah	**807.136.748.164,00**	**756.079.660.607,00**	**93,67**

- **Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Perjanjian Kinerja Perubahan 2025)**

  Efisiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran, serta program pendukung sasaran tidak menjadi bagian perhitungan efisiensi.

Tabel 3. 39 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Setiap Sasaran Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			%	EFISIENSI ANGGARAN (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)		
1	Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	88,13	87,3	99,03	852.476.750	514.277.485	60,33	164,15	39,67
2	Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,40	…	-	1.273.848.000	1.246.601.000	97,86	-	2,14
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	*Crime Rate*	80,00	188,69	(35,86)	2.370.772.528	2.367.572.400	99,87	(0,36)	0,13
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton	Nilai SAKIP Kab. Buton	65,00	63,73	98,04	5.514.697.040	4.976.829.655	90,25	108,63	9,75
5	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	78,11	22,66	28,75	63.826.924.370	60.311.285.262	94,49	30,43	5,51
6	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	77,81	77,65**	99,79	89.841.874.879	75.353.195.894	83,87	118,98	16,13
7	Meningkatnya kualitas keluarga yang sejahtera dan sesuai norma	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,1	64,2	105,07	3.647.679.575	2.698.305.695	73,97	142,04	26,03

	kehidupan masyarakat									
8	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	0,459	0,518**	87,14	386.829.200	385.081.650	99,55	87,53	0,45
9	Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan	13,04	13,46	96,77	959.969.900	721.287.215	75,14	122,44	24,86
		2. Rasio Gini	0,312	0,35	87,82					
		Rata-rata			**92,00**					
10	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,79	85,46	101,99	2.211.874.100	1.753.393.842	79,27	128,66	20,73
11	Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Ketahanan Daerah	0,38	0,40*	105,26	97.000.280	95.980.593	98,95	106,38	- 1,05
12	Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	55,51	68,67	123,70	411.226.700	266.567.000	64,82	190,84	35,18

13	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	74,93	79,67	106,32	31.195.466.192	28.633.533.742	91,79	115,83	8,21
14	Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	3,346,59	3,788,50	113,20	594.238.400	393.621.900	66,24	109,32	33,76
		Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	21,27	22,13	104,04					
		Indeks Ekonomi Biru	49,72	…	-					
		Rata-rata			**72,41**					
15	Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	2,89	3,01	104,15	422.859.608	198.255.600	46,88	222,16	53,12
16	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	3,02	2,72	90,06	86.050.000	85.830.000	99,74	90,29	0,26
17	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,83	3,30	61,34	412.720.000	412.215.668	99,88	61,41	0,12

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efisien penggunaan sumberdaya yang berdasarkan kinerja, rinciannya sebagai berikut:

1) Sasaran Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama dengan capaian kinerja 99,03% dan capaian anggaran 60,33%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 39,67% dan efisiensi penggunaan sumber daya 64,15%.
2) Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton dengan capaian kinerja 98,04% dan capaian anggaran 90,25%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 9,75% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,63%.
3) Sasaran Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan dengan capaian kinerja 99,79% dan capaian anggaran 83,87%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 16,13% dan efisiensi penggunaan sumber daya 18,98%.
4) Sasaran Meningkatnya kualitas keluarga yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat dengan capaian kinerja 105,07% dan capaian anggaran 73,97%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 26,03% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 42,04%.
5) Sasaran Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dengan capaian kinerja 92% dan capaian anggaran 75,14%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 24,,86% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,44%.
6) Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan capaian kinerja 101,99% dan capaian anggaran 79,27%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 20,73% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 28,66%.

7) Sasaran Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah dengan capaian kinerja 105,26% dan capaian anggaran 98,95%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 1,05% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,38%.

8) Sasaran Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) Berkualitas dengan capaian kinerja 123,7% dan capaian anggaran 64,82%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 35,18% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 90,84%.
9) Sasaran Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah dengan capaian kinerja 106,32% dan capaian anggaran 91,79%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 8,21% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,83%.
10) Sasaran Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA dengan capaian kinerja 72,41% dan capaian anggaran 66,24%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 33,76% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,32%.
11) Sasaran meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA dengan capaian kinerja 104,15% dan capaian anggaran 46,88%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 53,12% dan efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 112,16%.

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja Kabupaten Buton tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan kategori Baik, dengan capaian kinerja sebagai berikut:.

- Sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Buton tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 – 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target.

  Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama Bupati tahun 2025, disimpulkan bahwa terdapat 18 (Delapan Belas) capaian indikator sasaran atau sebanyak 66,66% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, 2 (Dua) Indikator sasaran atau sebesar 7,40% masuk dalam kategori tinggi, 2 (dua) Indikator sasaran atau sebesar 7,40% masuk dalam kategori sedang, namun ada 2 (dua) indikator sasaran atau 7,40% yang masuk dalam kategori rendah, bahkan ada 3 (tiga) indikator sasaran atau 11,11% masuk kriteria sangat rendah.

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

- Sebanyak 17 (tujuh belas) sasaran strategis dengan 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Buton tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 – 2029. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target.

  Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama Pemkab.Buton yang termuat dalam RPJMD Kab.Buton Tahun 2025-2030, disimpulkan bahwa terdapat 12 (Dua Belas) capaian indikator sasaran atau sebanyak 60% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, 3 (tiga) Indikator sasaran atau sebesar 15% masuk dalam kategori tinggi, 2 (dua) Indikator sasaran atau sebesar 10% masuk dalam kategori rendah, namun ada 1 (satu) indikator sasaran atau 5% yang masuk dalam kategori sangat rendah, bahkan ada 2 (dua) indikator sasaran atau 10% yang datanya belum tersedia yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Ekonomi Biru.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPD Kabupaten Buton Tahun 2023 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, menjadi bahan refleksi sebagai motivasi untuk berusaha lebih keras dan lebih baik lagi.